



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25/PERMEN-KP/2015
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan program pembangunan kelautan dan perikanan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
15. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Kabinet Kerja 2014-2019;

16. Peraturan ...

16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Renstra KKP adalah dokumen perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
2. Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Renja KKP adalah dokumen perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) Renstra KKP merupakan pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan program pembangunan kelautan dan perikanan.
- (2) Renstra KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Ruang lingkup Renstra KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. Pendahuluan, yang berisi latar belakang, kondisi umum, potensi, permasalahan dan lingkungan strategis;
- b. Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
- c. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
- d. Target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
- e. Penutup.

Pasal 4

Renstra KKP sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Renstra KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam Renja KKP yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

Menteri melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra KKP yang dituangkan dalam Renja KKP.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

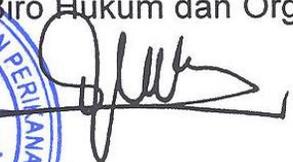
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1328

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Hanung Cahyono



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25/PERMEN-KP/2015
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dijalankan dengan peneguhan kembali jalan ideologis bangsa. Ideologi itu adalah Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti. Dengan demikian, prinsip dasar Trisakti menjadi basis dalam pembangunan karakter kebangsaan dan landasan kebijakan nasional 5 (lima) tahun kedepan, termasuk pembangunan kelautan dan perikanan.

Penjabaran Trisakti diwujudkan dalam bentuk:

1. **Kedaulatan dalam politik** diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2. **Berdikari dalam ekonomi** diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional.
3. **Kepribadian dalam kebudayaan** diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotong-royongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

Ideologi TRISAKTI menggambarkan bahwa pembangunan dicapai melalui perwujudan bangsa yang (1) *berdaulat*, yaitu bangsa yang mampu hidup sejajar dan sederajat dengan bangsa lain, hal ini dicapai melalui peningkatan kemampuan berdaya saing; (2) *Mandiri*, yaitu berkurangnya ketergantungan dari sumberdaya luar negeri melalui ketersediaan manusia yang berkualitas dan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) secara terpadu dan ramah lingkungan; (3) *Berkepribadian dan berkebudayaan*, yaitu menyadari jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan bangsa maritim, serta menempatkan maritim sebagai poros kekuatan untuk membangun perekonomian Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ideologi TRISAKTI dalam RPJMN

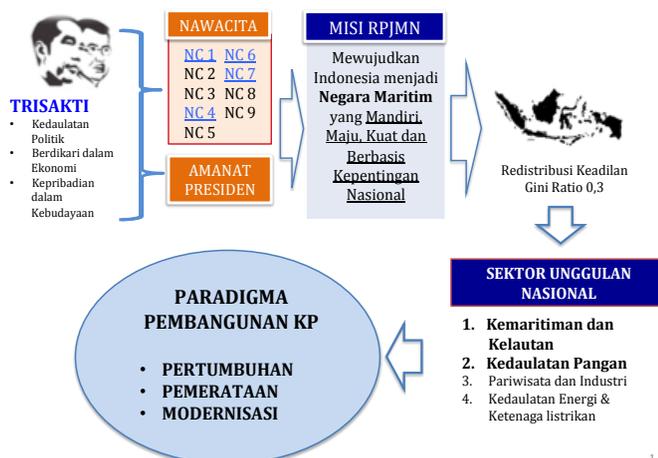
2015-2019 juga menggambarkan adanya reorientasi paradigma pembangunan (*paradigm shift*), dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan dan kepulauan.

Kerangka pencapaian tujuan RPJMN 2015-2019 dirumuskan lebih lanjut dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

RPJMN 2015-2019 merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yakni memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

Presiden telah menyatakan bahwa Laut adalah Masa Depan Peradaban Bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipinggirkan, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



Memperhatikan amanat Trisakti dan Nawa Cita, serta untuk mendukung terwujudnya Redistribusi Keadilan dengan target Gini Ratio 0,3 melalui sektor unggulan nasional “Kemaritiman dan Kelautan” dan “Kedaulatan Pangan”, maka paradigma pembangunan kelautan dan perikanan adalah (1) Pertumbuhan, (2) Pemerataan, dan (3) Modernisasi. Pertumbuhan yang dimaksud adalah bagaimana upaya KKP untuk dapat meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di dalam negeri.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun Rencana Strategis KKP 2015-2019 sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappanes Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L.

B. KONDISI UMUM

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, KKP telah melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan dengan hasil sebagai berikut :

1. PDB Perikanan pada tahun 2014 tumbuh sebesar 6,97%. Angka tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan PDB nasional yang besarnya 5,1% dan pertumbuhan PDB Pertanian dalam arti luas yang besarnya 3,3%. Apabila dilihat dari besaran nilai ekonominya, PDB Perikanan tahun 2014 mencapai Rp. 340,3 triliun. Angka ini belum termasuk PDB dari industri pengolahan dan kegiatan perikanan lainnya disektor hilir. Melihat pertumbuhan yang terus positif dan tingginya nilai PDB Perikanan serta besarnya potensi ekonomi sektor kelautan, maka sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor yang prospektif untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.

2. Produksi perikanan pada tahun 2014 mencapai 20,72 juta ton, yang terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 6,72 juta ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 14,52 juta ton (termasuk rumput laut). Peningkatan produksi perikanan setiap tahun tersebut telah mendukung ketahanan pangan nasional, terutama dalam penyediaan protein hewani untuk peningkatan gizi masyarakat.
3. Produksi garam rakyat tahun 2014 mencapai 2,5 juta ton. Capaian tersebut didukung oleh capaian produksi garam rakyat yang dilaksanakan melalui kegiatan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di 42 kabupaten/kota.
4. Nilai Tukar Nelayan rata-rata pada tahun 2014 mencapai 104,3 dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan rata-rata pada tahun 2014 mencapai 101,36. Fluktuasi NTN/NTPi salah satunya dipengaruhi faktor cuaca, indeks konsumsi rumah tangga dan indeks biaya produksi, serta kenaikan inflasi. Namun demikian nilai NTN secara rata-rata dan bulanan masih di atas 100, artinya nelayan dan pembudidaya ikan masih dapat menyimpan hasil pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan hidup sehari-harinya.
5. Ekspor hasil perikanan tahun 2014 mencapai USD 4,64 miliar. Capaian nilai ekspor tersebut didominasi oleh nilai ekspor komoditas udang yang mencapai USD 2,09 miliar dan diikuti oleh komoditas Tuna Tongkol Cakalang (TTC) sebesar USD 0,69 miliar pada tahun 2014.
6. Konsumsi ikan pada tahun 2014 mencapai 37,89 kg/kapita. Capaian tersebut didukung oleh kampanye nasional Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) yang dilaksanakan di seluruh provinsi.
7. Jumlah pulau-pulau kecil yang dikelola pada tahun 2014 mencapai 33 pulau. Kegiatan yang dilakukan merupakan pengembangan dan pengelolaan pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil terluar melalui penguatan sarana dan prasarana dasar.
8. Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan pada tahun 2014 mencapai 7,8 juta ha. Dengan demikian, sampai tahun 2014, telah ditetapkan kawasan konservasi perairan dengan luasan mencapai 16,45 juta ha. Sampai tahun 2019, telah ditargetkan perluasan kawasan konservasi perairan hingga mencapai luasan 20 juta ha.
9. Wilayah perairan bebas *IUU fishing* dan kegiatan yang merusak SDKP tahun 2014 mencapai 38,63%. Capaian strategis pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan selama kurun waktu tahun 2010-2014 diantaranya adalah hasil operasi kapal

pengawas dalam rangka penanggulangan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing*. Kinerja pengawasan didukung oleh kerjasama pengawasan dengan TNI AL, POLRI dan BAKORKAMLA, kerjasama penegakan hukum dengan instansi terkait, kerjasama internasional di bidang kelautan dan perikanan dan peningkatan kapasitas pengawasan SDKP melalui pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, pengembangan kelembagaan dan SDM Pengawasan.

10. Jumlah kasus penolakan ekspor per negara mitra pada tahun 2014 terdapat 4 kasus, atau dapat dijaga untuk tidak melampaui lebih dari 10 kasus. Hal ini didukung dengan adanya upaya KKP untuk peningkatan sistem karantina ikan dan jaminan mutu produk perikanan yang diekspor.
11. Jumlah hasil litbang yang inovatif pada tahun 2014 mencapai 105 hasil litbang, yang terdiri dari 29 litbang produk biologi, 25 litbang komponen teknologi, 33 paket teknologi, 5 inovasi teknologi, 3 rancang bangun, 10 model kelembagaan/pengelolaan/pengolahan garam. Hasil kegiatan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan tersebut memiliki kebaharuan sebagian atau kebaharuan seluruhnya, yang akan dipergunakan dalam mengembangkan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran berbasis IPTEK.
12. Rasio jumlah peserta yang dididik, dilatih, dan disuluh yang kompeten di bidang KP terhadap total peserta mencapai 96,22%. Selama tahun 2010-2014, setiap tahunnya jumlah peserta didik yang terserap di dunia usaha dan dunia industri, jumlah SDM KKP yang meningkat kompetensinya, dan jumlah kelompok pelaku utama/usaha perikanan yang diberikan penyuluhan berfluktuatif. Secara kumulatif pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan telah mampu menyediakan sebanyak 135.653 SDM KP yang kompeten. Capaian tersebut merupakan kontribusi hasil capaian empat jenis kegiatan, yaitu kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan dukungan kesekretariatan.

Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, sampai tahun 2014 telah dilakukan penyusunan kebijakan dengan melibatkan peran serta masyarakat guna memenuhi aspirasi masyarakat, antara lain yakni :

1. Penerbitan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang menyepakati 4 (empat) norma hukum penting, yakni: (i) pemberdayaan masyarakat hukum adat dan nelayan tradisional; (ii) penataan investasi; (iii) sistem perizinan; dan (iv) pengelolaan kawasan konservasi laut nasional. Pemberdayaan masyarakat diperkuat dalam inisiasi penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil beserta dengan

pemerintah dan dunia usaha. Dengan norma hukum ini, maka masyarakat dapat mengambil inisiatif mengusulkan rencana zonasi. Undang-undang perubahan ini juga telah memberikan pengakuan hak asal-usul masyarakat hukum adat untuk mengatur wilayah perairan yang telah dikelola secara turun temurun. Dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil pada wilayah masyarakat hukum adat oleh masyarakat hukum adat menjadi kewenangan masyarakat hukum adat setempat. Sementara bagi nelayan tradisional yang memiliki wilayah penangkapan ikan secara tradisional diakui dengan cara memasukkan wilayah tersebut sebagai subzona dalam rencana zonasi sehingga memiliki perlindungan hukum secara paripurna.

2. Untuk memberikan landasan yang kuat terhadap pelaksanaan pembangunan kelautan, telah diterbitkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang memuat beberapa materi yang sangat penting menyangkut penyelenggaraan pembangunan kelautan ke depan, antara lain (i) wilayah laut, (ii) pembangunan kelautan, (iii) pengelolaan kelautan, (iv) pengembangan kelautan, (v) pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, (vi) pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut, (vii) tata kelola dan kelembagaan-

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan pengelolaan wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran serta membangun ekonomi kelautan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, selama periode Oktober-Desember 2014 KKP telah mengeluarkan berbagai kebijakan, terutama terkait dengan upaya pemberantasan *IUU Fishing*. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (yang melarang *transshipment*), Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Kobo (*Carcharhinus longimanus*) dan Ikan Hiu Martil (*Sphyrna spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia.

Di samping itu untuk memperkuat kinerja dalam rangka pemberantasan *IUU fishing*, pada tahun 2014 juga telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2014 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Pelaksanaan Kebijakan Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap,

alih Muatan (*Transshipment*) di Laut, dan Penggunaan Nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK) asing.

Dalam rangka mendukung keberlanjutan sumberdaya perikanan, serta mempertimbangkan Lobster, Kepiting dan Rajungan telah mengalami penurunan populasi sehingga perlu menjamin keberadaan dan ketersediaan stok, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (*panulirus spp*), Kepiting (*scylla spp*) dan Rajungan (*portunus pelagicus spp*), yang melarang penangkapan *species* tersebut dalam kondisi bertelur dan mengatur ukuran yang boleh ditangkap.

Selanjutnya dengan pertimbangan bahwa penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat hela (*trawl*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang sebagian dirubah sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 9 dan penjelasannya yang mengamanahkan bahwa dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompressor. Diharapkan melalui penerapan peraturan tersebut, dapat dilakukan penataan kembali pengelolaan perikanan untuk kelestarian sumber daya ikan, pengurangan tekanan terhadap sumberdaya ikan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), pengaturan selektifitas alat penangkapan ikan, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh merupakan langkah untuk mewujudkan Negara kepulauan yang berdaulat dan sejahtera melalui pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

C. POTENSI

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan luas perairan laut 5,8 juta km² (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km², luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas ZEE Indonesia 2,55 juta km²). Secara geo-politik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis karena berada di antara benua Asia dan Australia, serta diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menempatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam konteks perdagangan global

(*the global supply chain system*) yang menghubungkan kawasan Asia-Pasifik dengan Australia.

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam, baik berupa SDA terbaharukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi), SDA tak terbarukan (seperti minyak dan gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, dan OTEC atau *Ocean Thermal Energy Conversion*), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nutfah. Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Potensi lestari sumberdaya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 7,3 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Komnas Kajiskan, 2013). Dari seluruh potensi sumberdaya ikan tersebut, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,8 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari, dan baru dimanfaatkan sebesar 5,4 juta ton pada tahun 2013 atau baru 93% dari JTB, sementara total produksi perikanan tangkap (di laut dan danau) adalah 5,863 juta ton. Potensi mikro flora-fauna kelautan juga belum tereksplorasi sebagai penyangga pangan fungsional pada masa depan.

Keanekaragaman hayati laut Indonesia memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan baik bagi kepentingan konservasi maupun ekonomi produktif. Luas terumbu karang yang dimiliki Indonesia saat ini yang sudah terpetakan mencapai 25.000 km² (BIG, 2013). Namun, terumbu karang yang masih dalam kondisi sangat baik hanya sekitar 5,30%, kondisi baik 27,18%, cukup baik 37,25 %, dan kurang baik sebesar 30,45 % (LIPI, 2012). Laut Indonesia memiliki sekitar 8.500 species ikan, 555 species rumput laut dan 950 species biota terumbu karang. Sumberdaya ikan di laut meliputi 37% dari species ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut.

Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah. Masih banyak wilayah perairan Indonesia yang memiliki potensi ekonomi namun belum terkelola secara memadai. Selain itu, potensi energi terbaharukan dari laut, seperti air laut dalam (*deep sea water*) masih menjadi tantangan untuk dikembangkan dan dimanfaatkan di masa yang akan datang. Industri maritim, bioteknologi, jasa kelautan, produksi garam dan turunannya, biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/ atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam, merupakan sub sektor

kelautan yang belum tergarap secara optimal. Dengan melihat besarnya potensi dan manfaat laut Indonesia, sudah seharusnya kelautan Indonesia menjadi penggerak baru ekonomi Indonesia di masa yang akan datang.

Seiring dengan kegiatan penangkapan ikan, kegiatan budidaya ikan juga meningkat terus sejak tahun 1980-an, seperti berkembangnya budidaya laut untuk berbagai jenis, seperti ikan kerapu, kakap, dan baronang; budidaya tambak seperti udang dan bandeng; serta budidaya air tawar seperti ikan mas, gurame, patin, dan lain-lain.

Potensi luas areal budidaya air tawar saat ini tercatat 2.830.540 Ha, termasuk potensi di perairan umum daratan (sungai dan danau), dengan tingkat pemanfaatan 302.130 Ha (10,7%). Secara spesifik, khusus untuk perairan umum daratan (danau dan waduk), luas secara keseluruhan tercatat 518.240 Ha. Bila diasumsikan 10% dari luasan tersebut dapat dimanfaatkan untuk perikanan budidaya, maka akan didapat luasan potensial budidaya air tawar di waduk dan danau sebesar 51.824 Ha. Luasan budidaya KJA di perairan umum saat ini tercatat 1.563 Ha atau 3%. Kecilnya pemanfaatan potensi budidaya air tawar disebabkan karena belum terkelolanya secara optimal potensi tersebut akibat tumpang tindihnya pemanfaatan potensi lahan budidaya air tawar, serta belum terbukanya secara mudah akses menuju kawasan potensial budidaya air tawar tersebut.

Potensi luas areal budidaya air payau saat ini tercatat 2.964.331 Ha, dengan tingkat pemanfaatan 650.509 Ha (21,9%). Kecilnya pemanfaatan potensi budidaya air payau disebabkan karena pengelolaan kawasan potensial budidaya air payau masih berada/ bersinggungan dengan kawasan mangrove, sehingga pemanfaatan potensi lahan budidaya air tersebut harus sejalan dengan kebijakan pengelolaan hutan mangrove. Selain itu belum terbukanya secara mudah akses menuju kawasan potensial budidaya air payau serta minimnya prasarana penunjang lainnya di kawasan potensial, menyebabkan pemanfaatan masih relatif kecil.

Potensi luas areal budidaya laut saat ini tercatat 12.123.383 Ha, dengan tingkat pemanfaatan 325.825 Ha (2,7%). Kecilnya pemanfaatan potensi budidaya laut disebabkan karena belum tersedianya payung hukum berupa peraturan yang menaungi Tata Ruang pengelolaan/ pemanfaatan ruang laut untuk berbagai kepentingan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pemanfaatannya. Hal ini penting bagi pelaku usaha sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan dalam berusaha dibidang budidaya laut. Selain itu tingginya modal yang diperlukan serta ketersediaan sarana penunjang yang terbatas, menyebabkan kurangnya minat masyarakat dalam usaha budidaya ikan laut.

Potensi luas areal budidaya rumput laut saat ini tercatat 1,1 juta Ha atau 9% dari seluruh luas kawasan potensial budidaya laut yang sebesar

12.123.383 Ha. Adapun tingkat pemanfaatannya diperkirakan baru mencapai 25%. Adapun jenis rumput laut yang dimiliki Indonesia tercatat 555 jenis rumput laut. Beberapa kendala dalam pengembangan budidaya rumput laut adalah terkait kualitas bibit rumput laut, penyakit, akses pasar serta tata niaga produk.

Perkembangan budidaya dalam dua dekade terakhir ini lebih cepat dari penangkapan sehingga produksi budidaya melampaui produksi perikanan tangkap sejak tahun 2010. Masih luasnya lahan yang potensial untuk budidaya memberikan harapan akan meningkatnya produksi budidaya di waktu yang akan datang. Sebagian dari produk budidaya juga sudah mulai diekspor seperti kerapu dan gurame khususnya untuk tujuan negara Asia Tenggara. Budidaya rumput laut diharapkan terus meningkat tidak hanya untuk kepentingan konsumsi tetapi juga untuk kepentingan lain seperti untuk kosmetik, dan lain-lain.

Indonesia memiliki sumberdaya alam yang sangat mendukung untuk pengembangan pakan ikan mandiri guna mengurangi ketergantungan akan pakan pabrikan yang sangat bergantung kepada bahan baku impor, dalam hal ini tepung ikan. Data produksi pakan pellet mandiri saat ini tercatat 35.000 ton dari 1,3 juta ton (2,7%) dari keseluruhan pakan ikan yang digunakan untuk produksi 2,6 juta ton ikan air tawar. Diprediksi pada tahun 2019, dengan target produksi ikan air tawar 6,5 juta ton, dapat dihasilkan 592 ribu ton pakan pellet mandiri dari 5,92 juta ton (10%) dari keseluruhan kebutuhan pakan.

Beberapa bahan tepung pakan yang dapat digunakan sebagai pengganti tepung ikan impor antara lain (a) Tepung maggot (ulat lalat hitam/black soldier) menggunakan media PKM (palm kernel meal) dari kebun sawit, (b) Daging kerang hijau, (c) Ikan rucah atau ikan sisa olahan, (d) Ikan pemakan plankton yang nilai ekonominya rendah di masyarakat, (e) Bahan fermentasi berbagai tumbuhan serta (f) Cacing lumbricus dengan media sampah organik.

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) di bidang kelautan dan perikanan memiliki peranan strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peranan strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan, sehingga memiliki kapasitas dan kompetensi yang diharapkan untuk optimalnya pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan.

Keberadaan Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, sebagai legalitas

dan dasar eksistensi pengawasan SDKP kedepan. Disamping ketentuan nasional tersebut, landasan lain yang tidak kalah penting yaitu ketentuan maupun resolusi Internasional yang mengamanahkan untuk pengawasan dalam kerangka mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang lestari dan bertanggung jawab.

Potensi untuk pengawasan SDKP yaitu ketersediaan SDM Pengawasan yang saat ini dimiliki yaitu 679 Pengawas Perikanan, PPNS Perikanan sebanyak 456 orang, Awak Kapal Pengawas sebanyak 279 orang dan Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebanyak 205 orang, dengan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan tersebut diharapkan lebih memperkuat pengawasan SDKP kedepan. Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait antara KKP dan TNI AL, POLRI, BAKAMLA, Mahkamah Agung, Kejaksaan dalam rangka penanganan pelanggaran telah terjalin dengan baik, kerjasama tersebut selama ini diimplementasikan melalui kelembagaan, prosedur dan operasional yang dilakukan selama ini.

Keberadaan dan fungsi kapal pengawas sebagai sarana utama dalam pengawasan di laut yang dimiliki sebanyak 27 unit kapal dengan berbagai ukuran dan type serta speedboat pengawasan sebanyak 89 unit berpotensi untuk mendukung dalam pengawasan SDKP kedepan. Selain sarana dan prasarana tersebut telah tersedia alat pemantauan kapal perikanan/VMS yang mampu memantau pergerakan kapal perikanan dan fasilitas penunjang seperti dermaga, kantor dan sarana prasarana pengawasan lainnya.

Tumbuh dan kembangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan SDKP secara lestari dan bertanggung jawab di seluruh Indonesia menjadi potensi mendukung pengawasan SDKP. Bentuk dukungan tersebut salah satunya melalui kearifan local di masing-masing daerah seperti awig-awig di Bali dan NTB, Sasi di Maluku, Panglima Laot di Aceh, Ninik Mamak di Sumatera Barat, Lubuk Larangan di Jambi dan masih banyak kearifan local lainnya.

Kegiatan Pendidikan dilaksanakan melalui proses belajar dengan pendekatan teaching factory terdiri dari 60 – 70% praktek dan 30 – 40% teori. Saat ini Pendidikan KP memiliki 1 Perguruan Tinggi, 9 (Sembilan) Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), 3 (tiga) Politkeknik Kelautan dan Perikanan, yang tersebar di wilayah nusantara. Tenaga pengajar satuan pendidikan KP berjumlah 429 Orang terdiri dari 223 guru dan 206 Dosen. Satuan pendidikan KP menerima peserta didik dari anak pelaku utama sebesar 40 % dari total penerimaan peserta didik setiap tahunnya.

Kegiatan Pelatihan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan terdiri dari 5 Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP), 1 Balai Diklat Aparatur (BDA), 429 Pusat Pelatihan Perikanan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), dan 33

Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini pusat pelatihan KP memiliki 75 widyaiswara dan 72 orang instruktur yang tersebar di masing-masing Balai Pendidikan dan Pelatihan KP.

Kegiatan Pelatihan ditujukan kepada masyarakat perikanan pelaku utama dan pelaku usaha di sektor penangkapan, budidaya, pengolahan, pemasar hasil perikanan, serta masyarakat kelautan dan perikanan lainnya. Kegiatan pelatihan juga dilengkapi sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi nasional. Sedangkan pelatihan aparatur ditujukan bagi aparatur negara meliputi pelatihan teknis, struktural aparatur, pelatihan fungsional, dan pelatihan prajabatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penyelenggaran penyuluhan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Pusat Penyuluhan Perikanan. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Kelautan dan Perikanan per 10 Juli 2015, total penyuluh perikanan sebanyak 13.621 orang, terdiri dari 3.249 penyuluh PNS, 1285 penyuluh Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), 8.749 penyuluh swadaya, 205 PPB Daerah, 40 penyuluh swasta, dan 93 penyuluh honorer.

D. PERMASALAHAN

Bidang kelautan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan laut di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya perikanan. Beberapa wilayah perairan laut Indonesia telah mengalami gejala *overfishing*. Selain itu, praktik-praktik *IUU fishing* yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), baik oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII) maupun oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi. Kerugian negara akibat dari *IUU fishing* di perairan Arafura diperkirakan mencapai Rp 11–17 triliun (Wagey dkk, 2002). Estimasi kerugian negara-negara di dunia akibat *IUU fishing* mencapai US\$ 10–23,5 miliar (Agnew dkk, 2005). Ancaman *IUU Fishing* dipicu kondisi sektor perikanan global, dimana beberapa negara mengalami penurunan stok ikan, pengurangan armada kapal penangkapan ikan akibat pembatasan pemberian izin penangkapan sedangkan permintaan produk perikanan makin meningkat. Di sisi lain, kemampuan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Indonesia masih lemah. Melihat ancaman dan tantangan tersebut, kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan perlu ditingkatkan sebagaimana amanat UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, melalui pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi, penyediaan

sarana dan prasarana pengawasan, pemenuhan regulasi bidang pengawasan dan kelembagaan di tingkat daerah, pengembangan kerjasama secara intensif dengan instansi lain, serta menggalang komitmen dan dukungan internasional dalam penanggulangan kegiatan *IUU fishing*. Masalah *IUU fishing* juga terkait dengan perbatasan dengan negara tetangga, khususnya terkait nelayan tradisional yang melanggar lintas batas ke negara lain. Meskipun upaya untuk edukasi dan peningkatan kesadaran nelayan RI mengenai batas-batas laut sudah dilakukan namun kemungkinan nelayan tradisional untuk melintas batas dan melakukan pelanggaran ke negara lain masih ada.

Masalah perbatasan laut merupakan salah satu kendala dalam pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan di wilayah perairan Indonesia. Beberapa masalah kejelasan perbatasan wilayah dengan negara tetangga belum diselesaikan. Hal ini menjadikan kasus perikanan di wilayah perbatasan belum bisa tuntas, sehingga peran KKP untuk menangani permasalahan tersebut pun perlu ditingkatkan.

Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terbatasnya prasarana saluran irigasi, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, kesiapan dalam menanggulangi hama dan penyakit, penyediaan fasilitas kolam dan air yang baik serta permasalahan bahan baku pakan dan kestabilan harga, serta tingginya harga pakan. Rendahnya produktifitas perikanan budidaya juga disebabkan karena struktur pelaku usaha perikanan budidaya adalah skala kecil/tradisional (\pm 80%), dengan keterbatasan aspek permodalan, jaringan teknologi dan pasar. Disamping itu serangan hama dan penyakit ikan/udang, serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah NKRI. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu perlu diiringi dengan peningkatan sistem jaminan kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman untuk konsumsi manusia.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif (*tariff barrier*) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu masing-masing negara, termasuk negara mitra dagang seperti Uni Eropa, China, Rusia, Canada, Korea, Vietnam

dan Norwegia, semakin memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan (*health, quality and safety assurance*). Sebagai anggota *World Trade Organization (WTO)* Indonesia berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam “*Agreement of The Application of Sanitary and Phytosanitari Measure*” (perjanjian SPS) yang memuat ketentuan tentang penerapan peraturan-peraturan teknis guna melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. Konsep perjanjian *Sanitary and Phytosanitary (SPS)* merupakan instrumen pengendali perdagangan internasional berupa hambatan teknis (*technical barrier to trade*)/hambatan non tariff (*non tariff barrier*). Untuk itu pengembangan sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam era perdagangan global.

Terkait dengan permasalahan garam, selama ini kebutuhan nasional garam dalam negeri dipenuhi dari impor. Sebagai negara yang memiliki panjang pantai nomor dua di dunia, sudah seharusnya kebutuhan nasional garam dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Saat ini produksi garam nasional belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri baik secara kuantitas maupun kualitas, yang antara lain dikarenakan usaha pegaraman masih tradisional, minimnya infrastruktur, dan tata niaga garam yang belum mendukung.

Permasalahan lain yang dihadapi terkait dengan masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang disebabkan oleh struktur armada penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, belum optimalnya integrasi sistem produksi di hulu dan hilir, serta masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana secara memadai. Disamping itu, aspek sangat mendasar yang mempengaruhi lemahnya daya saing dan produktivitas adalah kualitas SDM dan kelembagaannya. Saat ini jumlah SDM yang bergantung pada kegiatan usaha kelautan dan perikanan sangat besar, namun pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi dan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan informasi belum memadai dan belum merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah kepulauan.

Dalam rangka pengembangan usaha, permasalahan utama yang dihadapi adalah masih adanya keterbatasan dukungan permodalan usaha dari pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya kepada para nelayan/pembudidaya. Dalam kaitan ini, nelayan/pembudidaya ikan masih mengalami kesulitan mengakses permodalan atau kredit akibat terkendala oleh pemenuhan persyaratan prosedural perbankan.

Aktivitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, baik yang berada di daratan, wilayah pesisir, maupun lautan, tidak dapat terlepas dari keberadaan potensi bencana alam dan dampak perubahan iklim yang dapat terjadi di wilayah Indonesia. Bencana alam dan perubahan iklim dapat berdampak serius terhadap kegiatan pemanfaatan

sumberdaya kelautan dan perikanan, seperti kenaikan muka air laut (*sea level rise*) yang dapat menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil dan sebagian wilayah/lahan budidaya di wilayah pesisir, intrusi air laut ke daratan, peningkatan dan perubahan intensitas cuaca ekstrim (seperti badai, siklon, banjir) yang berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan dan budidaya ikan, serta kerusakan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, penyiapan kapasitas masyarakat untuk melakukan berbagai upaya mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim masih sangat diperlukan. Selain potensi bencana alam dan perubahan iklim, wilayah pesisir juga memiliki potensi kerusakan pesisir berupa kerusakan ekosistem, abrasi, sedimentasi, pencemaran dan permasalahan keterbatasan lahan. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya rehabilitasi ekosistem, pengendalian pencemaran, dan upaya revitalisasi diantaranya melalui reklamasi yang terkendali.

Kesejahteraan pelaku usaha perikanan (budidaya, penangkapan, pengolahan dan pemasaran) merupakan salah satu pilar penting dalam peningkatan daya saing bangsa di era perdagangan bebas serta penerapan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Namun, kondisi kesejahteraan para nelayan dan pelaku usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dengan pendapatan yang diperolehnya masih sangat terbatas. Permasalahan yang dihadapi dalam menghadapi MEA 2015, utamanya adalah belum adanya perlindungan terhadap pelaku usaha UMK untuk meningkatkan daya saing melalui sinergi lintas sektor (termasuk dalam mengakses sumber pembiayaan), perlindungan terhadap pasar domestik, dan sertifikasi produk.

Isu utama pembangunan wilayah nasional adalah masih besarnya kesenjangan antarwilayah khususnya kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dalam lima tahun mendatang (2015-2019), arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah. Sebagai negara maritim yang terdiri dari gugusan pulau-pulau (*Archipelagic State*) dimana laut Indonesia lebih luas dari daratan, laut menjadi sangat vital dalam pemerataan pembangunan nasional. Melalui visi misi Presiden, diharapkan laut dapat menghubungkan Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, termasuk pulau-pulau besar dan gugusan pulau-pulau kecil didalamnya, sekaligus sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi wilayah berbasis maritim (kelautan).

E. LINGKUNGAN STRATEGIS

KKP yang memiliki mandat untuk melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia perlu mengelola faktor lingkungan

organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, sebagai modal dasar untuk merumuskan strategi pembangunan kelautan dan perikanan. Salah satu teknik analisis yang digunakan untuk memetakan lingkungan strategis organisasi adalah teknik kekuatan-kelemahan-peluang-hambatan atau SWOT/ *strength-weakness-opportunities-threats*).

Pada konteks pembangunan kelautan dan perikanan, lingkungan strategis eksternal yang secara langsung berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yakni: *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, *United Nations Fish Stocks Agreement* (UNFSA) 1995, *FAO Compliance* 1993, *Port State Measures Agreement* 2009, *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC), *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT), *Code of Conduct for Responsible Fisheries dan International Plan of Action*, *Millennium Development Goals* kelautan dan perikanan, *Sustainable Development Goals* kelautan dan perikanan, *The United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) pada tahun 1994, serta *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC). Selain itu, terdapat pula berbagai Pakta Internasional dan Regional, seperti *World Trade Organization* (WTO), *Asia Pacific Economic Cooperation* (APCE), dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sebagai negara yang telah ikut mengadopsi hukum dan perjanjian internasional tersebut, maka Indonesia dituntut harus mampu memanfaatkannya demi menjamin keberlangsungan kepentingan nasional di bidang pembangunan perikanan.

Sedangkan lingkungan strategis kelautan dan perikanan internal yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan perikanan yakni (1) aspek ekonomi yang berfokus pada upaya peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap PDB, (2) aspek sosial dan politik, yang berkaitan dengan konstelasi politik di tingkat nasional maupun daerah serta pembagian wewenang urusan perikanan dengan pemerintah daerah dalam koridor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (3) kerangka kebijakan dan hukum nasional, terkait dengan ratifikasi berbagai konvensi internasional, pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perpres, Keppres, Inpres, dan berbagai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang berkenaan dengan bidang kelautan dan perikanan (termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan), (4) sistem kelembagaan dan pemerintahan di pusat dan daerah, terutama menyangkut sinergi dan dukungan lintas K/L terkait serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota, (5) perkembangan Iptek dan teknologi informasi, terutama terkait dengan penyediaan data statistik perikanan yang handal sangat diperlukan sebagai data dasar untuk mengukur tingkat eksploitasi dan status stok ikan di suatu WPPNRI, (6) kapasitas sumber daya manusia, terutama berkaitan dengan pendayagunaan peran strategis sumberdaya manusia perikanan sebagai penentu keberhasilan kegiatan di sentra-sentra pengolahan berbasis produk perikanan, dan (7) sistem pengawasan,

terutama terkait dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk menjamin ketertiban pelaksanaan pemanfaatannya demi terjaganya kelestarian sumberdaya tersebut, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Beberapa faktor strategis lingkungan internal yang menjadi kekuatan maupun kelemahan, antara lain meliputi (1) Sumberdaya ikan, habitat, dan produksi; (2) Pengelolaan perikanan nasional; (3) Geografi; (4) Kependudukan; (5) Ekonomi nasional; (6) Ideologi nasional; (7) Sosial-budaya nasional; (8) Politik, tata kelola pemerintahan, kebijakan, peraturan perundang-undangan Indonesia, dan penegakan hukum; (9) Pertahanan dan keamanan nasional; (10) IPTEK dan informasi nasional; (11) Ketersediaan bahan baku; (12) Konektivitas antar pulau; (13) Manajemen industri (teknologi produksi, SDM, pemasaran); (14) Permintaan hasil perikanan dalam negeri (termasuk UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan); (15) Pengelolaan sistem pembinaan mutu dan keamanan pangan; dan (16) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sedangkan faktor strategis lingkungan eksternal yang dapat menjadi peluang ataupun ancaman adalah (1) Permintaan hasil perikanan dunia; (2) Sumberdaya alam, praktek dan tingkat produksi perikanan dunia, (3) Globalisasi perekonomian, serta pasar bebas hasil perikanan regional dan dunia; (4) Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015; (5) Kerjasama bilateral, regional dan multilateral, serta instrumen internasional (termasuk RFMO); (6) Praktek *Illegal fishing* global; (7) Sumberdaya alam, praktik dan tingkat produksi dan pengelolaan perikanan dunia, pasok hasil perikanan dunia; dan (8) Kependudukan dunia.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Visi KKP adalah **“Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”**.

Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

B. MISI

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. **Kedaulatan (Sovereignty)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. **Keberlanjutan (Sustainability)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. **Kesejahteraan (Prosperity)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. Keberlanjutan dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelestarian sumberdaya. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, KKP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh *stakeholders* kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.

Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

C. TUJUAN

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni :

3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan

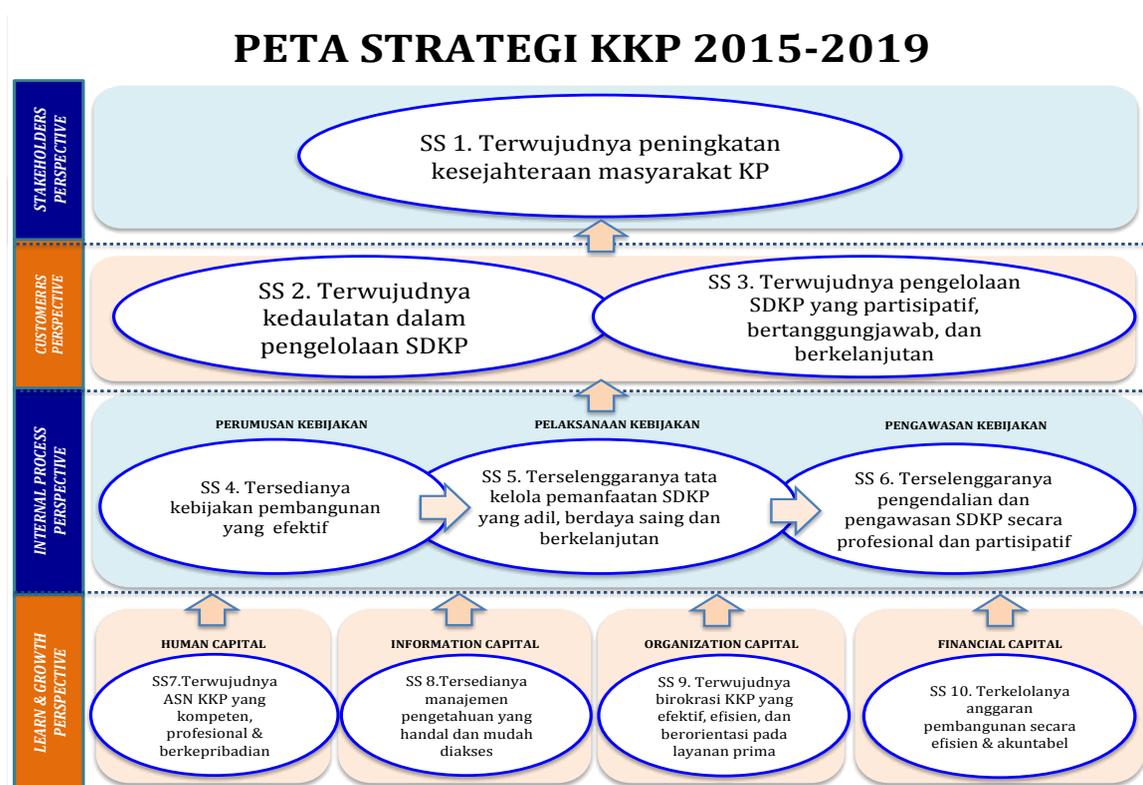
Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni :

6. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
7. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan



D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, KKP menjabarkan 3 misi yakni **“Kedaulatan”, “Keberlanjutan”, dan Kesejahteraan** dan menggunakan pendekatan metoda *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, sebagai berikut:



1. Stakeholders Prespective

Menjabarkan misi “Kesejahteraan”, maka sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah "Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP", dengan Indikator Kinerja :

- a. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dari 40,5 pada tahun 2015 menjadi 51 pada tahun 2019.
- b. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7% pada tahun 2015 menjadi 12% pada tahun 2019.

2. *Customer Perspective*

Menjabarkan misi “Kedaulatan”, maka sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP”, dengan Indikator Kinerja :

- a. Persentase Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019.
- b. Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri dari 5 pulau pada tahun 2015 menjadi 25 pulau pada tahun 2019.

Selanjutnya, menjabarkan misi “Keberlanjutan”, maka sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja :

- a. Nilai Pengelolaan Wilayah Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan dari 0,20 pada tahun 2015 menjadi 0,65 pada tahun 2019.
- b. Nilai Peningkatan Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dari 0,59 pada tahun 2015 menjadi 1,0 pada tahun 2019.
- c. Produksi perikanan, dari 24,12 juta ton pada tahun 2015 menjadi 39,97 juta ton pada tahun 2019.
- d. Produksi garam rakyat, dari 3,3 juta ton pada tahun 2015 menjadi 4,5 juta ton pada tahun 2019.
- e. Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 5,86 miliar pada tahun 2015 menjadi USD 9,54 miliar pada tahun 2019.
- f. Konsumsi ikan, dari 40,9 kg/kapita/thn pada tahun 2015 menjadi 54,49 kg/kapita/thn pada tahun 2019.
- g. Persentase peningkatan PNBPN dari sektor KP dari 5% pada tahun 2015 menjadi 15% pada tahun 2019.

3. *Internal Process Perspective*

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh KKP, yakni :

- a. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif”, dengan Indikator Kinerja Indeks efektivitas kebijakan pemerintah, dari 6 pada tahun 2015 menjadi 8 pada tahun 2019.

- b. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja Efektivitas Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 95% pada tahun 2019.
- c. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif”, dengan Indikator Kinerja:
 - Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu dari 56,6% pada tahun 2015 menjadi 83,36% pada tahun 2019.
 - Tingkat Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019.

4. *Learning and Growth Perspective (input)*

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan *input* yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* KKP. Terdapat 4 sasaran strategis yang akan dicapai yakni :

- a. Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yakni “Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian”, dengan Indikator Kinerja Indeks Kompetensi dan Integritas dari 65 pada tahun 2015 menjadi 85 pada tahun 2019.
- b. Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yakni “Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses”, dengan Indikator Kinerja Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dari 40% pada tahun 2015 menjadi 100% pada tahun 2019.
- c. Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yakni “Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”, dengan Indikator Kinerja Utama nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari BB pada tahun 2015 menjadi AA pada tahun 2019.
- d. Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yakni “Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntabel”, dengan Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran KKP dari Baik pada tahun 2015 menjadi Sangat Baik pada tahun 2019 dan Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan, (4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.

Kerangka pencapaian tujuan RPJMN 2015-2019 dirumuskan lebih lanjut dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Strategi pembangunan nasional yang terkait dengan tugas KKP adalah :

1. Agenda/Nawa Cita ke-1 :

Sub Agenda : Memperkuat Jati Diri sebagai Negara Maritim

- a. Meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara terpadu

- b. Menyempurnakan sistem penataan ruang nasional dengan memasukkan wilayah laut sebagai satu kesatuan dalam rencana penataan ruang nasional/regional
- c. Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Aksi Pembangunan Kelautan dan Maritim untuk penguasaan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan maritim untuk kesejahteraan rakyat
- d. Meningkatkan sarana prasarana, cakupan pengawasan, dan peningkatan kelembagaan pengawasan sumber daya kelautan
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan
- f. Mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* serta kegiatan yang merusak sumberdaya kalautan dan perikanan

2. Agenda/Nawa Cita ke-4:

Sub Agenda : Pemberantasan Perikanan Illegal/ IUU Fishing

- a. Peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana perikanan.
- b. Penguatan sarana sistem pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- c. Penataan sistem perizinan usaha perikanan tangkap.
- d. Peningkatan penertiban ketaatan kapal di Pelabuhan Perikanan.

3. Agenda/Nawa Cita ke-6 :

Sub Agenda : Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Hasil Perikanan

- a. Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi perikanan.
- b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan.
- c. Penyempurnaan tata kelola perikanan.
- d. Pengelolaan perikanan berkelanjutan.

4. Agenda/Nawa Cita ke-7 :

Sub Agenda: Peningkatan Kedaulatan Pangan melalui Peningkatan Produksi Perikanan

- a. Ekstensifikasi dan intensifikasi usaha perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi.
- b. Penguatan faktor input dan sarana prasarana pendukung produksi.
- c. Penguatan keamanan produk pangan perikanan.

Sub Agenda : Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan

- a. Pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.
- b. Penyediaan data dan informasi sumberdaya kelautan yang terintegrasi (*one map policy*) dalam rangka mendukung pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut.

- c. Pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut.
- d. Pengembangan SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya bahari.
- e. Peningkatan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir.

Berdasarkan RPJMN 2015-2019, salah satu dimensi pembangunan sektor unggulan yang terkait dengan KKP adalah “kemaritiman dan kelautan” dan “kedaulatan pangan” dengan sasaran pokok nasional sebagai berikut:

No.	Sasaran Pembangunan Nasional Sektor Unggulan	Baseline 2014	Sasaran 2019
1	Kedaulatan Pangan <ul style="list-style-type: none"> • Produksi Ikan (juta ton) 	12,4	18,8
2	Maritim dan Kelautan <ul style="list-style-type: none"> • Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar <ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatnya ketaatan pelaku usaha perikanan • Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan <ul style="list-style-type: none"> ○ Produksi hasil perikanan (termasuk rumput laut) (juta ton) ○ Pengembangan Pelabuhan Perikanan ○ Peningkatan luas kawasan konservasi laut (juta ha) 	52%	87%
		22,4	40-50
		21 unit	24 unit
		15,7	20

Pelaksanaan agenda pembangunan nasional dalam Nawa Cita dan pencapaian sasaran pokok nasional dilakukan bersinergi antara KKP dengan Kementerian/Lembaga dan instansi lain yang terkait serta dengan Pemerintah Daerah.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 ditetapkan dengan memperhatikan 3 dimensi pembangunan nasional, yakni SDM, sektor unggulan, dan kewilayahan. Sektor kelautan dan perikanan telah dijadikan sektor unggulan nasional, yang penjabarannya dilaksanakan KKP dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir, peran KKP yang dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan, serta tugas KKP dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional/Nawa Cita.

Arah kebijakan KKP disusun menjabarkan 3 pilar dalam misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pokok

- a. **Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.** Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/NawaCita ke-1 dan ke 4, serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan kedaulatan.
- b. **Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya saing, dan berkelanjutan.** Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan keberlanjutan.
- c. **Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.** Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan kesejahteraan.

2. Kebijakan Lintas Bidang

- a. Pengarusutamaan Gender
- b. Pembangunan Kewilayahan
- c. Adaptasi Perubahan Iklim
- d. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, strategi dan langkah operasional yang akan ditempuh adalah :

1. Kebijakan Pokok

- a. **Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan,** dilaksanakan dengan strategi :

1) **Memberantas IUU Fishing**

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Operasi pengawasan di laut dengan teknologi dan moda pengawasan yang terintegrasi, (b) Penanganan pelanggaran dan penegakan hukum di laut dengan pemberian sanksi yang tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku maupun korporasi yang melakukan pelanggaran (c) Penenggelaman kapal asing ilegal, (d) Penguatan Satgas Pemberantasan *Illegal Fishing*, (e) Penguatan kerjasama regional maupun internasional, (f) Penerapan *Monitoring, Control, and Surveillance* (MCS) secara konsisten

2) **Meningkatkan sistem pengawasan SDKP terintegrasi**

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penguatan sarana prasarana pengawasan (kapal pengawas dan pesawat pengawas/*surveillance aircraft* dan fasilitas pendukung pengawasan lainnya), (b) Penguatan SDM dan kelembagaan pengawasan, (c) Pengawasan kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan, (d) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP.

3) Mengembangkan sistem karantina ikan, pembinaan mutu, dan pengendalian keamanan hayati ikan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penguatan sistem karantina ikan, (b) Pembangunan unit pengawasan bersama/terintegrasi/*gateway* di wilayah perbatasan, (c) Sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, (d) Pengendalian agen hayati, (e) Standarisasi dan kepatuhan

b. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan, dilaksanakan dengan strategi dan langkah operasional sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Perencanaan ruang laut nasional dan kawasan strategis, (b) Pengaturan pemanfaatan ruang laut dan pesisir, (c) Pengaturan jasa kelautan (wisata bahari, BMKT, dll)

2) Mengelola Sumberdaya Ikan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembentukan dan operasionalisasi lembaga pengelola WPPNRI, (b) Penerapan kuota penangkapan, (c) Pembatasan ukuran kapal penangkap ikan, (d) Pembangunan armada penangkapan ikan nasional, (e) Pengaturan Alat Penangkap Ikan (API), (f) Penebaran benih di laut (ikan/kepiting/lobster/dll), (g) Pengelolaan pelabuhan perikanan dan kesyahbandaran

3) Mengendalikan Sumberdaya Perikanan Tangkap

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembenahan sistem perizinan berbasis web (on line) dan penguatan basis data, (b) Peningkatan PNBP dari SDA Perikanan

4) Mengelola Pemanfaatan Perairan Umum Daratan (PUD)

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penataan ruang di PUD, (b) Penebaran benih ikan endemik di PUD, (c) Pengaturan budidaya karamba di PUD

5) Membangun Kemandirian dalam Budidaya Perikanan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penyediaan induk unggul, benih ikan bermutu dan bibit rumput laut kultur jaringan, termasuk penguatan Balai Benih Lokal dan Unit Perbenihan Rakyat, (b) Budidaya rumput laut, (c) Budidaya ikan air tawar dan air payau, (d) Budidaya laut/marikultur, (d) Pakan mandiri dan obat ikan, (e) Penguatan prasarana dan sarana budidaya, (f) Pengembangan kawasan budidaya

6) Meningkatkan Sistem Logistik Hasil Perikanan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penyediaan Unit Pengolahan Ikan terapung, (b) Pengaturan pengangkutan ikan (*port to port* dan *fishing ground to port*), (c) Penyediaan sistem penyimpanan hasil kelautan dan perikanan, (d) Pembangunan prasarana pengangkutan ikan hidup multifungsi, (e) Penyediaan sarana prasarana angkutan garam.

7) Meningkatkan Mutu, Diversifikasi Dan Akses Pasar Produk Kelautan Dan Perikanan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Peningkatan mutu dan keamanan produk perikanan, (b) Standarisasi produk kelautan dan perikanan, (c) Diversifikasi produk kelautan dan perikanan, (d) Pembangunan industri rumput laut dan hasil perikanan, (e) Peningkatan produksi dan kualitas garam rakyat menjadi garam industri, (f) Promosi produk kelautan dan perikanan, (g) Penyiasatan pasar (*market intelligence*)

8) Merehabilitasi Ekosistem dan Perlindungan Lingkungan Laut

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Rehabilitasi wilayah pesisir (pembangunan *green belt*) dan lingkungan laut, (b) Pengaturan kawasan konservasi perairan, (c) Perlindungan dan dan pelestarian keanekaragaman hayati

9) Membangun Kemandirian Pulau-Pulau Kecil

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembangunan KP terintegrasi di pulau-pulau kecil terluar, (b) Promosi dan investasi pemanfaatan pulau-pulau kecil

c. Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi dan langkah-langkah sebagai berikut:

1). Memberi Perlindungan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Asuransi nelayan, (b) Fasilitasi bantuan paceklik/bencana alam, (c) Penguatan sosial budaya masyarakat adat.

2). Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penyiapan kelompok masyarakat terhadap akses permodalan usaha, (b) Perluasan akses masyarakat terhadap iptek dan informasi, (c) Penguatan kelembagaan dan permodalan perempuan dalam usaha kelautan dan perikanan.

3). Meningkatkan Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembinaan usaha masyarakat, (b) Peningkatan investasi bidang KP.

4). Meningkatkan Kompetensi Masyarakat KP Melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembangunan Politeknik Kelautan dan Perikanan, (b) Pembangunan technopark, (c) Peningkatan kualitas peserta didik (tata penyelenggaraan pendidikan, standarisasi, dan sertifikasi), (d) Peningkatan kompetensi peserta pelatihan (aparatur dan non aparatur), (e) Pengembangan sistem penyuluhan (standarisasi, sertifikasi, kelembagaan, dan ketenagaan).

5). Mengembangkan Inovasi IPTEK Bidang Kelautan Dan Perikanan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Litbang perikanan yang inovatif dan implementatif (pengkajian stok kuota dan alokasi sumberdaya ikan di 11 WPPNRI dan KPP-PUD, rekayasa teknologi dan genetika induk/benih/bibit unggul budidaya perikanan, dll), (b) Litbang pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing (produk perikanan, bioteknologi, dan garam), (c) Litbang sosial ekonomi kelautan dan analisis kebijakan kelautan dan perikanan, (d) Litbang sumberdaya laut dan pesisir (perubahan iklim, pemanfaatan ruang laut, dll), (e) Pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan, (f) Peningkatan *Knowledge Base Management System*.

2. Kebijakan Lintas Bidang

Pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 juga terkait dengan Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang, yakni (a) Pengarusutamaan Gender (PUG); (b) Pembangunan Kewilayahan; (c) Adaptasi Perubahan Iklim (API); dan (d) Tata kelola Pemerintahan yang Baik.

a. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender di bidang Kelautan dan Perikanan akan dilaksanakan dengan strategi **meningkatkan peran, akses, kontrol**

dan manfaat gender dalam pembangunan KP. Langkah-langkah operasional yang dilakukan antara lain melalui (a) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), (b) Penguatan kelembagaan PUG di KKP, (c) Penyiapan *roadmap* PUG, (d) penyusunan data terpilah, (e) Pengembangan statistik gender, (f) Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eselon I di KKP dan antar pusat-daerah.

b. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan kewilayahan akan dilaksanakan dengan strategi **mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah.** Langkah-langkah operasional yang dilakukan antara lain melalui (a) Mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera, (b) Penyiapan Rencana tata ruang wilayah dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), (c) Sinergi kegiatan di kawasan/sentra perikanan terpadu/Minapolitan/sentra bisnis perikanan rakyat berbasis pulau-pulau kecil, (d) Peningkatan investasi pemerintah, BUMN/BUMD, dan swasta pada kawasan/sentra perikanan terpadu/Minapolitan/sentra bisnis perikanan rakyat berbasis pulau-pulau kecil, (e) Deregulasi (*debottlenecking*) terhadap beberapa peraturan yang menghambat pelaksanaan investasi, (f) Sinergi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, (g) Sinergi kegiatan lintas sektor.

c. Adaptasi Perubahan Iklim

Adaptasi perubahan iklim akan dilaksanakan dengan strategi :

1). Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. Langkah-langkah operasional yang dilakukan antara lain melalui : (a) Rehabilitasi kawasan pesisir, (b) Pelaksanaan kegiatan budidaya, penangkapan dan pengolahan-pemasaran yang ramah lingkungan, (c) Pengelolaan kesehatan ikan, (d) Peningkatan kapasitas laboratorium Hama dan Penyakit Ikan (HPI), (d) Pengembangan komoditas ikan spesifik lokal unggulan dan spesies ikan tahan terhadap perubahan lingkungan.

2). Peningkatan Ketahanan Masyarakat KP terhadap Perubahan Iklim Langkah-langkah operasional yang dilakukan antara lain: (a) Sistem informasi Nelayan Pintar, (b) Pengembangan sistem rantai dingin dari kapal (penangkapan dan penanganan hasil tangkap ikan) hingga TPI dan unit pengolahan, (c) Pengembangan kurikulum dan modul pendidikan dan pelatihan sistem adaptasi dan mitigasi

bencana serta penanggulangan pencemaran laut, (d) Pengembangan sarana dan prasarana mitigasi bencana dan perubahan iklim di kawasan pesisir

d. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Untuk melaksanakan arah kebijakan diatas, strategi dan langkah yang akan ditempuh adalah :

- 1) Membangun budaya kerja yang profesional**, langkah yang akan ditempuh adalah: (a) Peningkatan kualitas dan disiplin aparatur; (b) Pengembangan manajemen pengetahuan; (c) Penyediaan data statistik dan informasi yang handal; (d) Pembangunan sistem perencanaan yang berorientasi pada hasil dan monitoring evaluasi pengelolaan kinerja yang terstruktur; (e) Penyiapan peraturan perundangan yang harmonis; (f) Pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel; (g) Pelayanan terpadu satu pintu yang berorientasi pada pelayanan prima; (h) Peningkatan PNBPF fungsional; (i) Kerjasama Internasional dan antarlembaga

- 2) Meningkatkan kualitas pengawasan internal**, langkah yang akan ditempuh meliputi: (a) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); (b) Penerapan sistem pengawasan internal yang profesional dan sinergis; (c) Peningkatan efektivitas implementasi pencegahan dan kebijakan anti korupsi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

3. Program Pembangunan

Arah kebijakan, strategi dan langkah operasional tersebut di atas, akan dilaksanakan melalui 10 program pembangunan kelautan dan perikanan, yakni :

1. Program Pengelolaan Ruang Laut
2. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya
4. Program Penguatan Daya Saing dan Sistem Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
5. Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
6. Program Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
7. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
8. Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
9. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP
10. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP

4. **Quick Wins dan Program Lanjutan Lainnya**

Pelaksanaan agenda pembangunan nasional dalam Nawa Cita dituangkan dalam **Quick Wins** dan **Program Lanjutan Lainnya**, yang ditugaskan kepada setiap K/L. *Quick wins* merupakan langkah inisiatif yang mudah dan cepat dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang dijalankan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Quick wins yang akan dilakukan antara lain adalah:

- a. Membangun Gerakan Nelayan Hebat
- b. Membangun Gerakan Kemandirian Pembudidaya Ikan
- c. Gerakan Cinta Laut dan Rehabilitasi Kawasan PANTURA Jawa
- d. Gerakan Ekonomi Kuliner Rakyat Kreatif dari Hasil Laut
- e. Pembangunan Techno Park berbasis Perikanan Rakyat
- f. Mendukung operasi keamanan laut di perairan perbatasan
- g. Realokasi subsidi solar menjadi LPG ke nelayan, berkoordinasi dengan Kementerian ESDM

Disamping *quickwins*, terdapat program lanjutan lainnya yang menjadi tugas KKP antara lain:

- a. Peningkatan produksi kelautan dan perikanan dua kali lipat menjadi sekitar 40-50 juta ton pada tahun 2019, pembangunan 100 sentra perikanan terpadu dan penerapan *Best Aquaculture Practices*.
- b. Pemberantasan *IUU fishing*.
- c. Rehabilitasi kerusakan pesisir, pengelolaan kawasan konservasi perairan, penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dan peningkatan kesejahteraan di pulau-pulau kecil terluar (PPKT).

C. **KERANGKA REGULASI**

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2015-2019, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Dalam Rencana Strategis KKP Tahun 2015-2019, kerangka regulasi akan disiapkan mengacu pada program legislasi nasional meliputi :

1. **Rancangan Undang-Undang (RUU)**, yakni (a) RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K), (b) RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, (c) RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, (d) RUU tentang Zona Tambahan Indonesia, (e) RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, (f) RUU tentang Pendanaan Suprastruktur Usaha Perikanan, (g) Revisi UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indoensia terkait pasal 24 ayat 3 mengenai pembentukan Bakorkamla, dan (h) Perbaikan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan terkait dengan beberapa indikator yang belum terpenuhi (pembatasan keikutsertaan asing, pembatasan kepemilikan, kewajiban penghitungan dampak negatif dalam pemanfaatan SDA-LH, keterlibatan masyarakat adat, perempuan dan kaum marginal, mekanisme penyelesaian konflik adat, mekanisme penyelesaian masalah masa lalu, dan penindakan perlakuan diskriminatif).

2. **Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)**, yakni (a) RPP tentang Kapal Perikanan, (b) RPP tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil, (c) RPP tentang Pembudidayaan Ikan, (d) RPP tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan serta Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan, (e) RPP tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparat Penegak Hukum di Bidang Perikanan dan Pihak Yang Berjasa Dalam Upaya Penyelamatan Kekayaan Negara, (f) RPP tentang Pengawasan Perikanan, (g) RPP tentang Izin lokasi dan Izin Pengelolaan Sumber Daya Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, (h) RPP tentang Kebijakan Pembangunan Kelautan, (i) RPP tentang Perencanaan Ruang Laut Nasional, (j) RPP tentang Perencanaan Ruang Laut, (k) RPP tentang Izin Lokasi di laut yang Berada di Wilayah Perairan dan Wilayah perairan yuridiksi, (l) RPP tentang Kriteria, persyaratan dan mekanisme pendirian, dan/atau penempatan bangunan di laut, (m) RPP tentang Budaya Bahari, (n) RPP tentang Industri Maritim dan Jasa Maritim, (o) RPP tentang Izin Lokasi di Laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yuridiksi dan tata cara pengenaan sanksi administratif, (p) RPP tentang Pendirian Bangunan Laut, (q) RPP tentang Pusat Fasilitas Kelautan, (r) RPP tentang Kebijakan Tata Kelola dan Kelembagaan Laut, (s) RPP tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Kelautan, (t) RPP tentang Gasetir Pulau, (u) RPP tentang Pemanfaatan Sumberdaya Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil, dan (v) Revisi PP No. 19 Tahun 2006 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan.
3. **Rancangan Peraturan Presiden (R. Perpres) dan Rancangan Keputusan Presiden (R. Keppres)**, yakni (a) R. Perpres tentang Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, (b) R. Perpres tentang Komite Nasional Coral Triangle Initiative on Coral Reef, Fisheries, and Food Securities Indonesia (CTI-CFF), (c) R. Perpres tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, (d) R. Perpres tentang Penyelenggaraan Litbang di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, (e) R. Perpres tentang Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional, (f) R. Perpres tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, (g) R. Perpres tentang Rencana Zonasi Laut, Selat dan Teluk, (h) R. Keppres Rencana Aksi Nasional Pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU

Fishing), dan (i) R. Perpres tentang Pengalihan Saham dan Luasan Lahan dalam Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil.

Secara terinci kerangka regulasi sebagaimana Lampiran II.

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

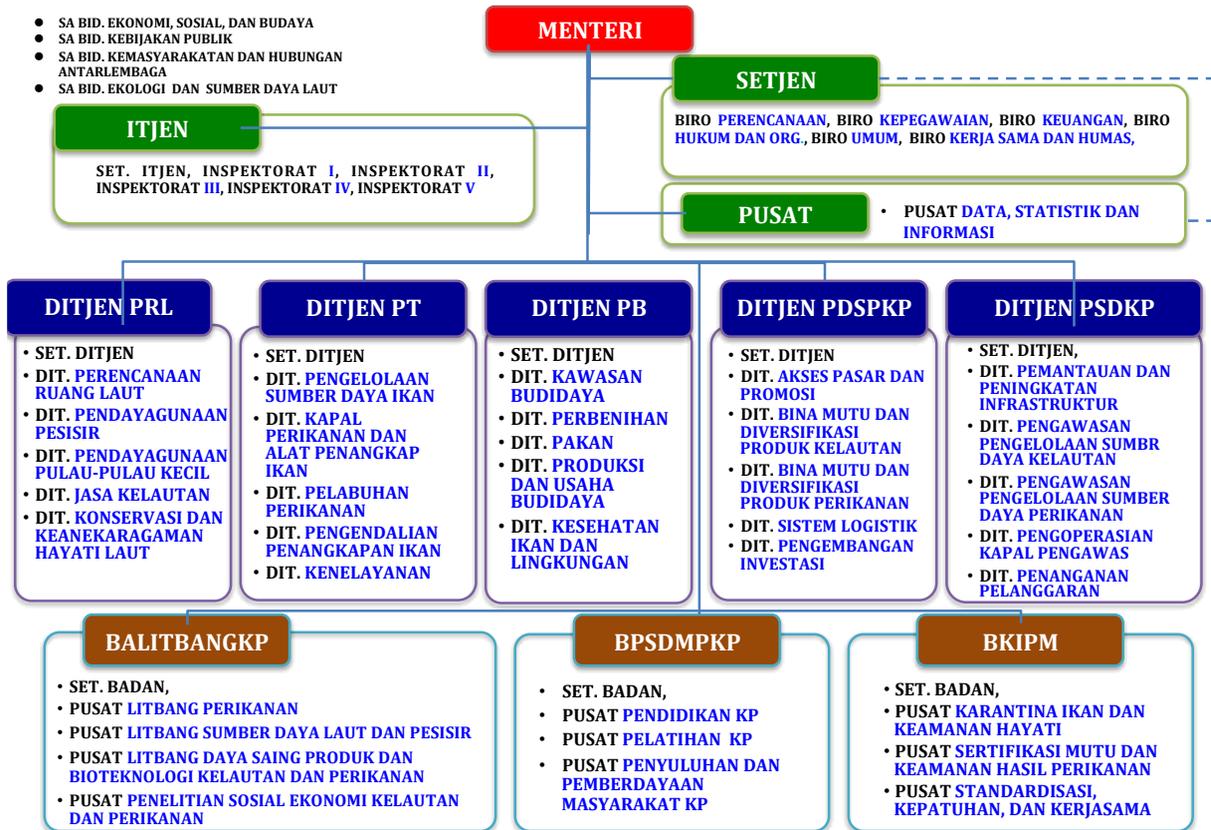
Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

Penguatan kapasitas kelembagaan KKP dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yakni:

1. Perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dari *production oriented* ke *people oriented*.
2. Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi.
3. Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku.
4. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang *right sizing, unified function*, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan.
5. Tata laksana dan sumber daya aparatur

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP telah melakukan penataan kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



Penataan kelembagaan KKP selanjutnya akan diikuti dengan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan. Disamping itu, akan diikuti penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis KKP di daerah serta penguatan kapasitas SDM terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu di KKP.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2015	2016	2017	2018	2019
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE						
SS 1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP						
1	Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP	40,5	42	45	47,5	51
2	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7,00	7,05	7,10	7,15	7,20
CUSTOMERS PERSPECTIVE						
SS 2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP						
3	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (%)	70	73	76	81	87
4	Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri	5	10	15	20	25
SS 3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan						
5	Nilai Pengelolaan wilayah KP yang berkelanjutan	0,20	0,29	0,39	0,57	0,65
6	Nilai peningkatan ekonomi KP	0,59	0,69	0,79	0,90	1,00
7	Produksi perikanan (juta ton)	24,12	26,04	30,29	32,93	39,97
8	Produksi garam rakyat (juta ton)	3,3	3,6	3,8	4,1	4,5
9	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	5,86	6,82	7,62	8,53	9,54
10	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	40,9	43,88	47,12	50,65	54,49
11	Persentase peningkatan PNBPN dari sektor KP (%)	5	7,5	10	12,5	15
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
SS 4. Tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif						
12	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah	6	6,5	7	7,5	8
SS 5. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan						
13	Efektivitas tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan (%)	70	76	82	89	95
SS 6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif						

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2015	2016	2017	2018	2019
14	Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu (%)	56,6	65,9	71,2	81,36	83,3
15	Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%)	70	73	76	81	87
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE						
SS 7. Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian						
16	Indeks kompetensi dan integritas	65	77	75	80	85
SS 8. Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses						
17	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	40	50	60	70	100
SS 9. Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima						
18	Nilai Reformasi Birokrasi KKP	BB	BB	A	A	AA
SS 10. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel						
19	Nilai kinerja anggaran KKP	Baik (80-90)	Baik (80-90)	Baik (80-90)	Sangat Baik (>90)	Sangat Baik (>90)
20	Opini atas Laporan Keuangan KKP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

2. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I A, sebagaimana Lampiran III.

3. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di KKP merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon II, sebagaimana Lampiran III.

B. KERANGKA PENDANAAN

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan dalam Bab terdahulu, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD, Dana Alokasi Khusus/DAK), swasta, perbankan dan non perbankan, dan masyarakat. Pendanaan APBN KKP akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yakni fokus pada kepentingan untuk kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Sementara itu dilakukan penguatan sinergi pendanaan antara KKP, K/L terkait serta APBD. Pendanaan juga diharapkan dapat dilakukan melalui operasionalisasi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) serta kredit yang disalurkan melalui perbankan. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana Lampiran III.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis KKP tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun, yang disusun untuk menjabarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2109, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L Tahun 2015-2019.

Rencana Strategis KKP tahun 2015-2019 digunakan sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap kinerja yang telah ditetapkan, dan akan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis KKP tahun 2015-2019, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

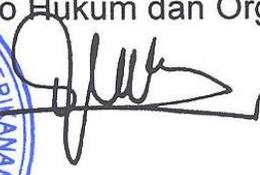
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25/PERMEN-KP/2015
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN
 DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2015-2019

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K)	Terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur kewenangan daerah di laut.	DJ PRL	<ul style="list-style-type: none"> • Setneg • Kemenkumham • Kementerian LH dan Kehutanan • Kementerian PU • Kementerian Agraria dan Tata Ruang 	2016
2.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Mengakomodir perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum di bidang perikanan	DJPT DJPB DJ PSDKP	Setneg Kemenkumham	2016
3.	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	Mengakomodir tantangan yang dihadapi nelayan dalam peningkatan kehidupan seperti:	DJPT	<ul style="list-style-type: none"> • Setneg • Kemenkumham • Kementrian Koordinasi Bidang Pembangunan 	2016

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		a. Minimnya pendapatan dan modal kerja b. Minimnya prasarana dan sarana nelayan c. Kurangnya perlindungan Hak Nelayan d. Keterbatasan Akses Pasar		Manusia dan Kebudayaan	
4.	RUU tentang Zona Tambahan	Sampai saat ini belum ada pengaturan di Zona Tambahan. Padahal Zona Tambahan penting bagi Indonesia untuk melakukan pencegahan dan penindakan (pengejaran seketika (<i>hot pursuit</i>) yang berkaitan dengan pelanggaran di bidang fiskal, kepabeanan, keimigrasian, kesehatan, dan perluasan pelanggaran dibidang narkoba, <i>trafficking</i> , terorisme pengangkutan benda purbakala dan lain sebagainya	DJ PRL	<ul style="list-style-type: none"> • Setneg • Kemenkumham • Kementrian Maritim 	2015
5.	RUU tentang Landas Kontinen Indonesia	Mengakomodir kebutuhan hukum terkait dengan pengelolaan landas kontinen	DJ PRL	<ul style="list-style-type: none"> • Setneg • Kemenkumham • Kemenlu 	2016

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		Indonesia serta sevaga revisi/pengganti UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan saat ini.			
6.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembudidaya Ikan	Tindak lanjut Pasal 18 ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Th. 2009	DJPB	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan HAM • Setneg 	2015
7.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan	Pasal 22 dan Pasal 24 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009	DJ PDS BKIPM	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan HAM • Setneg 	2015
8.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kapal Perikanan.	Tindak lanjut Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009	DJPT	<ul style="list-style-type: none"> • Setneg • Kementerian Hukum dan HAM • Kemen Perhubungan 	2015

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
9.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi daya-Ikan Kecil.	Tindak lanjut Pasal 64 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009	DJPB	Kementerian Hukum dan HAM	2015
10.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Perikanan.	Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009	PSDKP	<ul style="list-style-type: none"> • Menko Polhukam • Setneg • Kementerian Hukum dan HAM 	2015
11.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Berjasa Dalam Upaya Penyelamatan Kekayaan Negara	Tindak lanjut Pasal 76 C ayat (6) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009	SETJEN	<ul style="list-style-type: none"> • Setneg • Kementerian Hukum dan HAM • Kemen Keuangan 	2015

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
12.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Izin lokasi dan Izin Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sanksi Administratif Pemanfaatan Sumber Daya Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tindak lanjut Pasal 22C dan Pasal 71 ayat (5) UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Th 2014	DJ PRL DJPT	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Perekonomian • Kementerian PU • Kementerian ESDM • Kementerian Agraria dan Tata Ruang • Kementerian LH dan Kehutanan • Kementerian Hukum dan HAM • Kementerian Keuangan • Kemendagri • Setneg 	2015
13.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembangunan Kelautan	Tindak lanjut Pasal 13 ayat (4), Pasal 27 ayat (5), Pasal 32 ayat (5), Pasal 36 ayat (4), dan Pasal 38 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.	SETJEN	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan HAM • Kemenko Maritim • Setneg • Bappenas • Kementerian Keuangan 	2015

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
14.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan Ruang Laut	Tindak lanjut UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.	DJ PRL	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan HAM • Kemendagri • Kemenko Maritim 	2015
15.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Laut	Tindak lanjut Pasal 69 ayat (4) dan Pasal 70 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.	DJ PRL	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan HAM • Kemendagri • Kemenko Maritim 	2015
16.	R. Perpres tentang Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Tindak lanjut Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014	DJ PRL	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PU • Kementerian Pariwisata • Kementerian ESDM • Kementerian Keuangan • Bappenas • Kementerian Hukum dan HAM, • Setneg • Badan Pusat Statistik 	2015

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
17.	R. Perpres tentang Komite Nasional <i>Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Securities Indonesia</i> (CTI-CFF)	Implementasi <i>The Agreement of The Establishment of The Regional Secretariat of the Coral Triangle Initiative on Coral Reef, Fisheries, and Food Securities Indonesia</i> (CTI-CFF)	DJ PRL	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Perekonomian • Kemenko Maritim • Kementerian Keuangan • Kementerian Luar Negeri • Bappenas • Kementrian Pariwisata 	2016
18.	R. Perpres tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing	Tindak Lanjut Pasal 26A UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014	DJ PRL	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PU • Kementerian Pariwisata • Kementerian ESDM • Kementerian Keuangan • Bappenas • Kementerian Hukum dan HAM • Setneg • Kementerian BUMN • Kementerian Tenaga Kerja • Badan Koordinasi 	2015

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
				Penanaman Modal <ul style="list-style-type: none"> • Badan Informasi Geospasial 	
19.	R. Perpres tentang Penyelenggaraan Litbang di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Tindak Lanjut Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014	DJ PRL BALITBANG KP	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Perekonomian • Kemenko Maritim • Kementerian Keuangan • Kementerian Luar Negeri • Bappenas • Kementerian Ristek • LIPI 	2016
20.	R. Perpres tentang Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional	Perpres Mandiri	SETJEN	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Perekonomian • Kemenko Maritim • Kementerian Keuangan • Kemendagri • Bappenas • Pemda Maluku 	2015
21.	R. Perpres tentang Sempadan Pantai	Tindak Lanjut Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,	DJ PRL	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan HAM • Kementerian LH dan Kehutanan 	2015

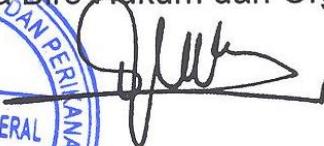
NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014		<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Agraria dan Tata Ruang • Kemendagri 	
22.	R. Keppres Rencana Aksi Nasional Pemberantasan <i>Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing</i> (IUU Fishing)	Sebagai mandat dari Regional Plan of Action (RPOA) IUU Fishing	DJPT	Menko Polhukam, Menko Maritim, Kementarian Pertahanan, TNI AL, POLRI , BAKAMLA, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, Bappenas	2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono



LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25/PERMEN-KP/2015
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
 PERIKANAN TAHUN 2015-2019

KERANGKA PENDANAAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Anggaran (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019
KL	Prog	Keg				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	(Rp Miliar)
			KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN								10.597,81	#REF!	17.249,94	20.377,02	24.236,53	#REF!
				Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP	40,5	42	45	47,5	51						
					Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7,00	8,00	9,50	11,00	12,00						
				Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP	Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (%)	70	73	76	81	87						
					Jumlah Pulau-pulau kecil yang mandiri	5	10	15	18	21						
				Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan	Nilai Pengelolaan wilayah KP yang berkelanjutan	0,20	0,29	0,39	0,57	0,65						
					Nilai peningkatan ekonomi KP	0,59	0,69	0,79	0,90	1,00						
					Produksi perikanan (juta ton)	24,12	26,04	30,29	32,93	39,97						
					Produksi Garam Rakyat (juta ton)	3,3	3,6	3,8	4,1	4,5						
					Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	5,86	6,82	7,62	8,53	9,54						
					Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	40,9	43,88	47,12	50,65	54,49						
					Persentase peningkatan PNBPN dari sektor KP (%)	5	7,5	10	12,5	15						
				Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah	6	6,5	7	7,5	8						
				Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan	Efektivitas tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan	70%	76%	82%	89%	95%						
				Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif	Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu	56,6%	65,9%	71,2%	81,36%	83,36%						
					Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%)	70%	73%	76%	81%	87%						
				Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian	Indeks kompetensi dan integritas	65	75	77	80	85						
				Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	40%	50%	60%	70%	100%						
				Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KKP	BB	BB	A	A	AA						
				Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel	Nilai kinerja anggaran KKP	Baik (80-90)	Baik (80-90)	Baik (80-90)	Sangat Baik (>90)	Sangat Baik (>90)						
					Opini atas Laporan Keuangan KKP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						

KERANGKA PENDANAAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Anggaran (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)
KL	Prog	Keg				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	(Rp Miliar)
				Terwujudnya Hasil Litbang yang Inovatif dan Implementatif di Bidang Sosial Ekonomi KP	Model Sosial Ekonomi Pembangunan Sektor KP	2	4	8	10	15	5,99	8,00	16,00	23,00	32,70	85,69
				Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Litbang dan Layanan Iptek di Bidang Sosial Skonomi KP	Jumlah Sarana Prasarana Litbang Sosial Ekonomi KP yang Terfasilitasi	1	1	1	1	1	4,82	5,45	6,38	8,61	9,58	34,84
					Jumlah Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Litbang Iptek Sosial Ekonomi KP	1	1	1	1	1						
			Penelitian dan Pengembangan Iptek Perikanan								222,21	177,90	315,86	415,09	449,43	1.580,48
				Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan Perikanan yang Implementatif Berdasarkan Data dan Informasi Ilmiah	Jumlah Rekomendasi dan Masukan Kebijakan Litbang Perikanan	20	21	21	21	22	86,86	101,17	117,93	158,55	177,88	642,39
					Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Laut yang Teridentifikasi Karakteristik Biologi Perikanan serta Habitat Sumberdaya, Potensi Produksi, Kapasitas Penangkapan Ikannya	11	11	11	11	11						
					Jumlah Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan (KPP PUD) yang Teridentifikasi Karakteristik Biologi Perikanan serta Habitat Sumberdaya, Potensi Produksi, Kapasitas Penangkapan Ikannya	8	8	8	8	8						
					Jumlah Konservasi Habitat dan/atau Sumberdaya Ikan	5	5	5	5	5						
					Jumlah Data dan Informasi Litbang Perikanan	41	41	41	41	41						
					Jumlah Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan	320	332	320	320	320						
				Terwujudnya Hasil Litbang yang Inovatif di Bidang Perikanan	Jumlah Bahan Usulan HKI Perikanan	3	3	3	3	3	45,08	39,77	43,31	54,12	54,77	237,04
					Jumlah Inovasi Teknologi Perikanan	85	76	75	75	74						
					Jumlah Komponen Inovasi Perikanan	32	32	32	32	32						
				Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Litbang dan Layanan Iptek Pengelolaan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana, serta Kelembagaan Litbang Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11	11	11	11	11	90,27	36,97	154,63	202,41	216,78	701,06
					Jumlah Dukungan Teknis Litbang Perikanan	11	11	11	11	11						
			Penelitian dan Pengembangan Iptek Sumber Daya Laut dan								48,22	235,66	457,97	250,50	248,02	1.240,37
				Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan KP Berdasarkan Data dan Informasi Ilmiah Litbang Kewilayahan, Dinamika dan SD Laut dan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Terkait Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Laut dan Pesisir Secara Berkelanjutan	18	10	15	18	20	18,56	20,65	26,67	34,71	37,16	137,75
					Jumlah Kawasan Pesisir yang Terpetakan Sumberdayanya	5	5	5	5	5						
					Jumlah WPP yang Terpetakan Karakteristik dan Dinamika Laut	5	5	5	5	5						
					Jumlah Data dan/atau Informasi Sumberdaya dan Laut dan Pesisir	5	8	8	8	8						
					Karya Tulis Ilmiah Litbang Sumberdaya Laut dan Pesisir	45	45	45	45	45						
				Terwujudnya Hasil Penelitian dan							13,58	17,34	22,80	32,95	37,01	123,67

KERANGKA PENDANAAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Anggaran (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)
KL	Prog	Keg				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	(Rp Miliar)
				Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir yang inovatif	Jumlah Bahan Usulan HKI Sumberdaya Laut dan Pesisir	1	1	1	1	1						
					Jumlah Inovasi Teknologi Sumberdaya Laut dan Pesisir	10	15	20	25	30						
					Jumlah Komponen Inovasi Sumberdaya Laut dan Pesisir	5	8	10	13	15						
				Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Litbang dan Layanan Iptek Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir	Jumlah Sarana Prasarana Litbang IPTEK Sumberdaya Laut dan Pesisir	2	2	2	2	2	16,08	197,67	408,50	182,85	173,86	978,96
					Jumlah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Litbang IPTEK Sumberdaya Laut dan Pesisir	2	2	3	4	4						
				Pengelolaan Inovasi dan Alih Teknologi KP							3,60	62,23	71,82	90,89	86,40	314,94
				Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan Pengelolaan Inovasi dan alih Teknologi KP yang Implementatif	Rekomendasi Kebijakan Penerapan dan Alih Teknologi	0	7	7	7	7	-	3,48	3,82	4,62	4,59	16,51
				Terwujudnya Pengelolaan Inovasi dan Alih Teknologi KP	Jumlah Teknologi yang direkomendasikan	0	10	10	10	10	3,60	52,50	62,50	79,35	74,67	272,62
					Jumlah Adopsi dan/atau kerjasama Iptek	59	75	90	100	110						
					Jumlah Usulan HKI KP ke Lembaga Paten Nasional	3	6	10	12	15						
					Jumlah Teknologi yang Dikomersilkan	0	1	1	2	2						
					Jumlah Penyebaran Teknologi KP	6	12	24	34	34						
				Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Litbang dan Layanan Pengelolaan Inovasi dan Alih Teknologi KP	Jumlah Sarana dan Prasarana, serta Kelembagaan Pengelolaan Inovasi dan Alih Teknologi KP yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	3	1	1	1	-	6,25	5,50	6,93	7,14	25,82
					Jumlah Dukungan Teknis Pengelolaan Inovasi dan Alih Teknologi KP	0	1	1	1	1						
				Penelitian dan Pengembangan Iptek Instrumentasi Kelautan dan Perikanan							82,06	130,58	74,12	87,91	87,13	461,79
				Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan KP Berdasarkan Data dan Informasi Ilmiah Litbang Instrumentasi KP	Jumlah Rekomendasi Penelitian dan Pengembangan Instrumentasi Kelautan dan Perikanan	3	4	13	13	13	5,92	10,13	19,19	23,25	23,19	81,67
					Jumlah Data dan Informasi Penelitian dan Pengembangan Instrumentasi Kelautan dan Perikanan	1	3	3	4	4						
					Jumlah Karya Tulis Ilmiah Bidang Penelitian dan Pengembangan Instrumentasi Kelautan dan Perikanan	32	32	32	32	32						
				Tersedianya Hasil Litbang yang Inovatif di Bidang Instrumentasi KP	Jumlah Bahan Usulan HKI Instrumentasi KP	0	1	2	3	4	8,37	9,40	10,84	13,64	14,04	56,29
					Jumlah Inovasi Teknologi Instrumentasi KP	7	6	6	6	6						
					Jumlah Komponen Inovasi Instrumentasi KP	4	4	4	4	4						
				Tersedianya Sistem Informasi di Sentra Nelayan Hasil Penelitian dan Pengembangan Instrumentasi KP (Quick Wins)	Jumlah (kumulatif) Sentra Nelayan yang Terbangun Sistem Informasi Nelayan (Quick Wins)	20	30	15	20	15	3,00	3,00	2,00	1,15	1,09	10,24
				Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas							64,77	108,04	42,09	49,88	48,81	313,59

KERANGKA PENDANAAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Anggaran (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)
KL	Prog	Keg				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	(Rp Miliar)
				Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Litbang dan Layanan Iptek Instrumentasi KP	Jumlah Prasarana/Infrastruktur Instrumentasi KP	1	1	0	0	0						
					Jumlah Sarana dan Prasarana, serta Kelembagaan Litbang Instrumentasi Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	5	5	5	5						
					Jumlah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Litbang Instrumentasi kelautan dan perikanan	1	1	1	1	1						
			Penelitian Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan								21,73	10,79	37,16	48,71	49,80	168,18
				Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan KP Berdasarkan Data dan Informasi Ilmiah Penelitian Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan	Jumlah Rekomendasi Penelitian Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan	0	4	6	8	10	4,59	6,43	8,19	12,63	12,96	44,80
					Jumlah Kawasan Kelautan dan Perikanan yang Terpetakan Sumberdaya Lahannya	3	4	6	11	11						
					Jumlah Data dan Informasi Penelitian Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan	2	2	2	3	5						
					Jumlah Karya Tulis Ilmiah Bidang Penelitian Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan	15	15	15	15	15						
				Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Litbang dan Layanan Iptek Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana, serta Kelembagaan Litbang Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	1	1	1	1	17,14	4,36	28,97	36,08	36,84	123,38
					Jumlah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Litbang Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan	1	1	1	1	1						
032	11	3991	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan IPTEK								348,44	366,14	399,29	502,26	529,03	2.145,17
				Terwujudnya ASN Balitbang KP yang kompeten, profesional dan berkepribadian	Indeks kompetensi dan integritas	65	75	77	80	85						
				Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	40%	50%	60%	70%	100%						
				Terwujudnya birokrasi Balitbang KP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Balitbang KP	BB	A	A	A	AA						
				Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel	Nilai kinerja anggaran Balitbang KP	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%						
				Terpenuhinya belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Balitbang KP (%)	100	100	100	100	100	188,38	212,12	227,80	285,61	291,72	
					Persentase pemenuhan layanan perkantoran Balitbang KP (%)	100	100	100	100	100	94,26	90,60	102,98	131,59	143,44	

KERANGKA PENDANAAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Anggaran (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)					
KL	Prog	Keg				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	(Rp Miliar)					
			PROGRAM KARANTINA, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN												491,35	741,26	800,00	1.200,00	1.500,00	4.732,61	
				Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat KP	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)		8	9,5	11,00	12											
				Terwujudnya kepatuhan pelaku usaha Kelautan dan perikanan dalam ekspor, impor dan antar area	Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan di wilayah pengeluaran/pemasukan ekspor, impor, dan antar area (%)		73	76	81	87											
					Penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra (kasus)	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10											
				Terwujudnya pencegahan penyebaran HPIK, pengendalian mutu dan kreamanan hayati ikan yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan	Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor (unit)	550	575	600	625	650											
					Presentase jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)	80%	84%	88%	92%	96%											
					Jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif melalui kajian analisis resiko (jenis)	5	10	15	20	25											
					Peningkatan PNPB sub sektor karantina ikan dan pengendalian Mutu (%)		7,5	10	12,5	15											
					Peningkatan Nilai ekspor hasil perikanan melalui sertifikasi karantina (%)		10,38	11,73	11,94	11,84											
032	11	3988	Pembinaan dan Penerapan Sistem Perkarantina dan Keamanan Hayati Ikan								159,53	236,15	251,68	398,68	490,84	1.536,88					
				Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina, jaminan mutu dan keamanan hayati ikan secara profesional dan partisipatif	Persentasi penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk kedalam wilayah RI (%)	77%	80%	88%	92%	96%	77,78	84,26	86,12	143,44	180,88	572,47					
					Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantina dan kreamanan hayati Ikanyang diselesaikan (%)	90	95	95	95	95											
					Lokasi yang terpetakan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif	46	56	66	76	86											
				Terpetaknya sebaran penyakit ikan karantina	Lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit ikan karantina (lokasi)	184	339	342	368	460	55,84	88,99	97,00	119,39	133,06	494,29					
				Tersedianya kebijakan perkarantina, mutu dan keamanan hayati ikan yang partisipatif	Jumlah draf peraturan perundangan undangan bidang perkarantina dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan (dokumen)	2	2	2	3	3	0,58	2,89	3,15	3,65	4,24	14,51					
				Terselenggaranya sistem perkarantina dan pengendalian keamanan hayati ikan yang sesuai standar	Jumlah sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi standar (sertifikat)	31.500	32.500	33.500	34.500	35.000	11,79	19,10	20,82	44,15	68,01	163,87					
					Jumlah sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi standar	137.000	139.000	141.000	143.000	144.000											
					Jumlah instalasi karantina ikan milik pihak ketiga yang layak untuk ditetapkan (unit)	220	230	240	250	260											
				Meningkatnya UUPI yang menerapkan CKIR							9,12	33,81	36,85	79,06	94,23	253,07					

KERANGKA PENDANAAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Anggaran (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)
KL	Prog	Keg				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	(Rp Miliar)
					Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) yang menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) (unit)	75	175	315	420	500						
					Junlah Negara yang harmonis dalam standar penerapan sistem perkarantinaaan ikan (negara)	2	2	3	4	4						
					Terselenggaranya penatausahaan pusat karantina ikan	100%	100%	100%	100%	100%	4,42	7,10	7,74	8,98	10,42	38,67
			Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan								36,17	54,02	60,21	148,63	211,53	510,56
				Terselenggaranya sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar	Lokasi Perairan Laut yang dipetakan dari cemaran Marine Biotoxin dan Logam Berat (lokasi)	3	5	7	9	10	23,87	24,93	27,18	79,62	102,29	257,89
					Jumlah Unit Pengolahan Ikan yang teregistrasi negara mitra (unit)	125	150	200	250	300						
					Lokasi yang termonitor keseharian ikan, residu dan bahan berbahaya (lokasi)	25	27	29	31	32						
					Jumlah sertifikasi mutu produk ekspor	82.000	82.000	84.000	86.000	87.000						
					Jumlah pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability (UPI)	22	22	24	26	28						
					Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen inspeksi ISO 17020 (unit)	10	12	13	14	15						
					Jumlah negara mitra yang harmonis dengan sistem , mutu dan keamanan hasil perikanan (MoU/MRA)	34	35	36	37	38						
					Meningkatnya sertifikat jaminan mutu (HACCP) pada UPI	1.161	1.300	1.295	1.355	1.395	5,73	16,99	18,52	40,19	62,01	143,44
					Tersedianya kebijakan mutu dan keamanan hasil perikanan yang partisipatif	1	1	2	2	2	0,39	2,41	2,63	5,86	13,12	24,41
					Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	90	95	95	95	95	3,22	6,46	7,04	17,67	28,36	62,76
					Terselenggaranya penatausahaan pusat sertifikasi mutu	100%	100%	100%	100%	100%	2,96	3,22	4,85	5,28	5,76	22,07
			Pengendalian Sistem Perkarantinaaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan								29,56	90,00	98,13	156,99	196,66	571,33
				Terselenggaranya sistem							26,80	87,09	94,93	153,47	192,78	555,07
					Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 (unit)	12	13	14	15	16						
					Jumlah laboratorium yang konsisten dalam penerapan ISO 17025 (unit)	15	17	19	21	22						
					Jumlah Unit Kerja lingkup otoritas kompeten yang menerapkan Sistem Pengendalian Mutu (unit kerja)	20	23	26	28	29						
					Tenaga Fungsional Pengendali Hama Penyakit Ikan (PHPI) dan Pengawas Mutu (Wastu) yang mengikuti uji kompetensi (orang)	180	200	220	240	240						
					Peningkatan jumlah RSNI metode pengujian	3	4	5	6	7						

KERANGKA PENDANAAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Anggaran (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)
KL	Prog	Keg				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	(Rp Miliar)
					Jumlah hasil uji banding dan rujukan yang divalidasi	1.000	1.100	1.200	1.300	1.350						
					Jumlah jenis parameter uji yang di profisiensi	4	4	4	4	4						
					Jumlah negara Mou/MRA kerjasama sistem perkarantinaa keamanan hayati, mutu dan kaecamanan hasil perikanan	36	37	39	41	42						
					Perjanjian Kerja Sama sistem perkarantinaa keamanan hayati, mutu dan keamanan hasil perikanan (Lembaga)		3	5	7	8						
				Tersedianya kebijakan publik perkarantinaa, keamanan hayati, mutu dan keamanan hasil perikanan	Jumlah kebijakan publik bidang perkarantinaa ikan, yang diselesaikan (dokumen)	3	3	3	4	4						
					Jumlah kebijakan publik bidang mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan (kebijakan)	1	2	3	3	3						
				Terselenggaranya sistem pengendalian dan pengawasan	Tingkat keberhasilan pengawasan di exit dan entry point wilayah perbatasan (%)		73%	76%	81%	87%						
					Persentase penyelesaian tindak pidana Kelautan Perikanan di wilayah pengeluaran/pemasukan ekspor, impor dan antar area (%)		55%	60%	65%	75%						
				Terselenggaranya penatausahaan pusat manajemen mutu	Persentase penatausahaan Pusat Manajemen Mutu yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	2,76	2,91	3,20	3,52	3,87	16,26
			Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan								266,09	361,09	389,98	495,70	600,97	2.113,83
				Terwujudnya ASN BKIPM yang kompeten, profesional dan berkepribadian	Indeks Kompetensi dan Integritas lingkup BKIPM	65	75	77	80	85	7,31	16,55	17,87	29,30	40,84	111,87
				Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	Persentase unit kerja lingkup BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	40%	50%	60%	70%	100%	6,64	12,17	13,14	24,20	35,33	91,49
				Terwujudnya birokrasi BKIPM yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Kinerja RB BKIPM	BB	A	A	A	AA	27,56	41,73	45,06	68,67	72,56	255,58
				Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel	Nilai kinerja anggaran BKIPM	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%	8,50	9,56	10,32	21,15	32,04	81,56
				Terpenuhinya belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai BKIPM (%)	100	100	100	100	100	150,49	205,30	221,72	254,98	293,22	1.125,70
					Persentase pemenuhan layanan perkantoran BKIPM (%)	100	100	100	100	100	65,59	75,80	81,86	97,42	126,97	447,64
			PROGRAM PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN								906,39	1.678,66	1.750,00	2.000,00	2.500,00	8.835,05

KERANGKA PENDANAAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Anggaran (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)
KL	Prog	Keg				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	(Rp Miliar)
				SDM KP memiliki kompetensi sesuai kebutuhan	Persentase lulusan yang terserap di dunia kerja bidang kelautan dan perikanan terhadap lulusan pendidikan KP	95%	95%	95%	95%	95%						
					Persentase anak pelaku utama yang diterima di satuan pendidikan kp terhadap peserta didik baru	40%	44%	46%	48%	50%						
					Persentase lulusan pelatihan yang dapat menerapkan hasil pelatihnnya terhadap yang dilatih	90%	90%	90%	90%	90%						
				Masyarakat KP yang memiliki kemandirian	Jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha yang meningkat kelasnya (kelompok)	4.500	6.400	7.400	8.500	9.700						
					Jumlah pelaku utama/pelaku usaha yang meningkat usahanya dari skala kecil menjadi skala menengah (orang)	4.500	10.000	15.000	20.000	25.000						
				Pelatihan Kelautan dan Perikanan							214,12	405,35	422,57	482,94	619,63	2.144,61
				Tersedianya lulusan pelatihan KP sesuai standar kompetensi kerja nasional/standar kompetensi kerja khusus di bidang KP	Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih(orang)	23.000	35.000	40.000	45.000	50.000	61,71	212,08	216,06	259,07	346,05	1.094,98
					Jumlah aparaturnya lulusan pelatihan yang kompeten (orang)	2.200	8.000	8.000	8.500	9.000						
					Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih bersertifikat kompetensi (orang)	19550	29750	34000	35700	42500						
				Tersedianya lembaga pelatihan kelautan dan perikanan sesuai standar penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi di bidang KP	Jumlah lembaga pelatihan kelautan dan perikanan sesuai standar (unit)	406	431	456	481	481	71,37	38,05	39,67	42,34	66,67	258,11
					Jumlah Rancangan Standar Kompetensi Kerja KP (buah)	8	14	20	6	6						
					Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan (unit)	25	25	25	-	-						
				Tersedianya Taman Teknologi KP	Jumlah taman teknologi KP (unit)	4	8	15	24	24	20,00	70,00	80,00	90,00	80,00	340,00
				Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien							61,04	85,22	86,83	91,53	126,91	451,53
					Persentase dokumen penatausahaan kegiatan pelatihan KP	100%	100%	100%	100%	100%	26,51	31,22	31,43	32,58	62,07	183,81
					Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai UPT Pelatihan KP (%)	100%	100%	100%	100%	100%	34,53	54,00	55,40	58,95	64,84	267,72
				Pendidikan Kelautan dan Perikanan							519,19	576,19	600,67	686,48	888,10	3.270,62
				Terpenuhinya tenaga terdidik yang kompeten sesuai standar							337,91	337,39	351,72	401,97	532,46	1.961,46
					Jumlah peserta didik pada satuan pendidikan KKP sistem vokasi yang kompeten (orang)	6.325	6.725	6.950	7.250	7.325						
					Jumlah SDM KKP yang melakukan peningkatan jenjang pendidikan formal (orang)	110	110	110	110	110						
					Jumlah satuan pendidikan KP yang terakreditasi sesuai standar (unit)	13	13	14	17	17						
				Peningkatan Kapasitas masyarakat kp dalam mendapatkan akses pendidikan	Jumlah warga belajar yang mendapatkan akses pendidikan vokasi non formal KP		500	500	500	500	-	1,50	1,56	1,79	2,23	7,08
				Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien							181,28	237,30	247,38	282,72	353,40	1.302,08

KERANGKA PENDANAAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Anggaran (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)
KL	Prog	Keg				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	(Rp Miliar)
					a. Volume produksi (ton)	6.299.290	6.451.330	6.634.220	6.808.330	6.982.560						
					b. Nilai Produksi (Rp Juta)	115.910.840	125.174.890	134.830.020	142.006.340	148.890.750						
					Nilai Tukar Nelayan (NTN)	104,5	105,0	105,5	106,0	106,5						
					Rata-Rata pendapatan:											
					a. Pendapatan RTP/bulan (Rp/RTP/bulan)	5.145.860	5.485.100	5.823.570	6.047.320	6.250.500						
					b. Pendapatan Nelayan/bulan (Rp/nelayan/bulan)	1.933.640	2.068.200	2.199.500	2.290.920	2.374.200						
					Pertumbuhan PDB Perikanan	7,00	8,00	9,50	11,00	12,00						
				Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan	Persentase Peningkatan PNPB Perikanan Tangkap	3,0	4,5	5,0	5,5	6,0						
				Tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif	Indeks Efektifitas Kebijakan Pemerintah	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0						
				Terseleenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan	Nilai investasi usaha perikanan tangkap (Rp Trilyun)	20	23	25	28	31						
					Jumlah penyaluran akses pemodal perikanan tangkap (Rp Milyar)	850	900	950	1.000	1.050						
					Jumlah WPP yang dikelola sesuai Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) (WPP)	2	5	7	9	11						
				Pengelolaan Sumber Daya Ikan							161,62	105,24	139,14	161,10	181,77	749
				Meningkatnya pengelolaan sumber daya ikan (SDI) yang berkelanjutan di perairan laut dan perairan umum daratan	Jumlah ekosistem perairan pedalaman yang direvitalisasi (lokasi)	3	6	9	12	15	78,64	59,81	81,57	92,46	102,05	414,53
					Jumlah laut teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (WPP)	5	7	9	10	11						
					Jumlah laut ZEEI yang terkelola sumber daya ikannya (WPP)	2	4	6	7	7						
					Jumlah resolusi dan CMM RFMO yang diimplementasikan (buah)	3	3	3	3	3						
					Jumlah perairan yang terevaluasi pengelolaan sumber daya ikannya (WPP)	3	6	9	10	11						
				Meningkatnya ketersediaan data, informasi dan statistik perikanan tangkap yang akurat untuk pengelolaan sumber daya ikan	Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit)	250	500	750	1.000	1.250	81,11	43,36	56,57	67,64	78,72	327,40
					Jumlah kapal perikanan yang dipantau oleh observer (unit)	500	150	200	250	300						
					Jumlah ketersediaan data dan statistik perikanan tangkap (dokumen)	7	7	7	7	7						
				Terseleenggaranya kegiatan ketatausahaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Persentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (%)	100	100	100	100	100	2	2,07	1,00	1,00	1,00	6,94
				Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan							491,7	2.783,62	738,25	539,90	441,99	4.995,47
				Terwujudnya kapal perikanan Indonesia, alat penangkap ikan dan pengawakan yang memenuhi standar di setiap WPP	Jumlah kapal perikanan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan (unit)	700	1.200	1.500	1.800	1.900	280,89	1.175,70	65,60	75,90	84,08	1.682,18

KERANGKA PENDANAAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Anggaran (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)
KL	Prog	Keg				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	(Rp Miliar)
					Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi ketentuan (unit)		3.150	3.300	3.500	3.600						
					Jumlah Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikasi dari inovasi alat penangkap standar dan sertifikasi dari inovasi kapal perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yang dihasilkan (buah)	23	25	26	28	30						
					Jumlah kapal perikanan yang terdaftar sebagai kapal perikanan (unit)	18.000	20.000	22.500	25.000	27.000						
					Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan (orang)	700	1.200	1.700	1.900	2.000						
					Jumlah kapal yang menerapkan cara penanganan ikan yang baik di atas kapal (unit)	200	400	600	800	1.000						
					Jumlah operasional kapal yang dihitung produktivitasnya (unit)		800	1.200	1.500	1.800						
				Meningkatnya armada perikanan tangkap nasional yang modern, efisien dan berdaya saing	Jumlah kapal perikanan yang terbangun (unit)	163	3.547	500	300	200	201,25	1.602,50	671,50	463,16	357,22	3.295,63
					Jumlah alat penangkap ikan yang terbangun dan dioperasikan (unit)		8.435	5.250	4.000	3.350						
				Terselenggaranya kegiatan ketatausahaan kegiatan Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan	Persentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan (%)	100	100	100	100	100	9,56	5,41	1,15	0,84	0,69	17,66
			Pengelolaan Pelabuhan Perikanan								1.285,70	97,73	660,00	720,00	745,00	3.508,43
				Meningkatnya kapasitas pengelolaan dan pelayanan pelabuhan perikanan	Jumlah pelabuhan perikanan yang melaksanakan kesyahbandaran (lokasi)	102	110	120	130	150	50,51	34,93	70,00	75,00	95,00	325,45
					Jumlah pelabuhan perikanan yang menerapkan SHTI (lokasi)	22	32	37	42	45						
					Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional (lokasi)	22	30	50	70	90						
					Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi standar pelayanan ISO-9001 (lokasi)		5	10	15	22						
					Jumlah pelabuhan perikanan yang dilakukan pengendalian pembangunan konstruksi (lokasi)	55	50	60	70	80						
					Jumlah identifikasi dan penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan (lokasi)	34	34	34	34	34						
				Berkembangnya pelabuhan perikanan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah	Jumlah pengembangan pelabuhan perikanan daerah prioritas (lokasi)	3	0	5	5	5	1.102,57	37,05	565,00	620,00	625,00	2.950
					Jumlah pengembangan pelabuhan perikanan UPT Pusat (lokasi)	22	22	22	23	24						
					Jumlah pengembangan pelabuhan perikanan yang ramah lingkungan	3	0	4	4	4						

KERANGKA PENDANAAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Anggaran (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)
KL	Prog	Keg				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	(Rp Miliar)
					Jumlah pengembangan sentra perikanan terpadu (lokasi)	30	0	20	20	20						
					Jumlah pelabuhan perikanan yang optimal menerapkan sistem informasi dan keterpaduan (lokasi)	22	120	135	150	165						
				Terselenggaranya kegiatan ketatausahaan kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Persentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Direktorat Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (%)	100	100	100	100	100	132,62	25,75	25,00	25,00	25,00	233,37
			Pengendalian Penangkapan Ikan								39,42	32,48	61,57	73,69	88,23	295,39
				Meningkatnya pengendalian usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan SDI di setiap WPP secara akuntabel dan tepat waktu	Jumlah alokasi izin yang diberikan terhadap peluang alokasi usaha penangkapan ikan yang tersedia (unit)	10.000	12.500	12.600	12.700	12.800		19,91	23,89	28,67	34,41	
					Jumlah realisasi kapal terhadap alokasi dalam SIUP (unit)	9.600	11.250	11.340	11.430	11.500						
					Waktu pelayanan izin usaha penangkapan ikan (SIUP) (hari kerja /dokumen permohonan)	10	9	8	7	6						
					Waktu pelayanan izin kapal penangkap/pengangkut ikan (SIPI, SIKPI) (hari kerja/dokumen permohonan)	7	6	5	4	3						
					Jumlah kapal penangkapan ikan yang memenuhi kepatuhan usaha (unit)	100	100	100	100	100						
				Meningkatnya pengelolaan perizinan perikanan tangkap nasional	Jumlah unit usaha penangkapan ikan yang terevaluasi (unit)		1	1	1	1	22,37	11,57	36,68	44,02	52,82	
					Jumlah penguatan dan integrasi sistem perizinan pusat-daerah (Prov/Kab/Kota)	11	15	20	25	34						
					Jumlah pengelolaan basis data dan informasi usaha penangkapan ikan pusat-daerah (Prov)		15	20	25	34						
				Terselenggaranya kegiatan ketatausahaan kegiatan Pengendalian Penangkapan Ikan	Persentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan (%)	100	100	100	100	100	1.750,81	1,00	1,00	1,00	1,00	
			Pengelolaan Kenelayanan								437,45	299,73	774,66	968,33	1.210,41	3.690,59
				Meningkatnya kapasitas kenelayanan	Jumlah penguatan kelembagaan usaha nelayan (kelompok)	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200	160,84	31,03	38,79	48,48	60,60	339,74
					Jumlah peningkatan akses pendanaan usaha nelayan (lokasi)	34	34	34	34	34						
					Jumlah nelayan yang mampu mengelola usahanya (orang)	2.040	2.080	3.120	4.160	5.200						
					Jumlah diversifikasi usaha keluarga nelayan (Rumah Tangga Perikanan/RTP)	1.020	1.040	2.060	3.080	4.050						
					Jumlah pembinaan sistem informasi kenelayanan (lokasi)	30	2	20	20	10						
				Meningkatnya perlindungan kenelayanan	Jumlah kawasan sentra nelayan yang ditata dan terintegrasi (lokasi)	100	57	200	200	200	272,82	267,70	734,63	918,29	1.147,86	3.341,29
					Jumlah nelayan yang terlindungi (orang)	20.000	250.000	312.500	390.625	488.281						
					Jumlah fasilitasi sertifikasi tanah nelayan (bidang tanah)	23.000	20.000	23.000	23.000	23.000						
				Terselenggaranya kegiatan ketatausahaan kegiatan Penguatan Kenelayanan	Persentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Direktorat Kenelayanan (%)	100	100	100	100	100	3,80	1,00	1,25	1,56	1,95	9,56
			Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap								268,26	400,04	444,73	490,45	541,45	2.144,93

KERANGKA PENDANAAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Anggaran (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	
KL	Prog	Keg				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	(Rp Miliar)	
				Terwujudnya ASN DJPT yang kompeten, profesional dan berkepribadian	Indeks Kompetensi dan Integritas lingkup DJPT	82	84	87	89	90	6,00	6,50	6,06	6,37	6,69	31,62	
				Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	Persentase unit kerja lingkup DJPT yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95	43,04	30,55	36,53	38,18	39,92	188,21	
				Terwujudnya birokrasi DJPT yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi lingkup DJPT	BB	BB	BB	A	A	6,50	6,50	7,15	7,87	8,65	36,67	
				Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien & akuntabel	Nilai kinerja anggaran lingkup DJPT (%)	Baik (80-90)	53,02	53,80	56,49	59,32	62,28	284,92					
				Terpenuhinya belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai DJPT (%)	100	100	100	100	100		302,69	338,50	378,72	423,92	1.443,82	
					Persentase pemenuhan layanan perkantoran DJPT(%)	100	100	100	100	100							
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN BUDIDAYA								1.360,77	1.633,50	2.282,84	3.244,70	4.673,82	13.195,63	
				Meningkatnya produksi perikanan budidaya.	Produksi perikanan budidaya (Juta ton)	17,90	19,46	22,80	26,72	31,32							
					- Ikan (juta ton)	7,30	8,35	9,41	10,55	11,78							
					- Rumput Laut (juta ton)	10,60	11,11	13,39	16,17	19,54							
					Ikan Hias (milyar ekor)	1,70	1,90	2,10	2,30	2,50							
				Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Perikanan Budidaya	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7	8	9,5	11	12							
					Jumlah kredit program bidang perikanan budidaya yang disalurkan (Rp. Miliar)	135	325	575	925	1390							
					Jumlah investasi bidang perikanan budidaya (Rp. Miliar)	68211,9	29973,2	60031,8	72229,9	90287,7							
					Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	101	101,5	102	102,5	103							
			Pengelolaan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan								107,66	84,50	126,75	190,13	285,19	794,22	
				Tersedianya kebijakan pembangunan bidang kesehatan ikan dan lingkungan yang implementatif	Jumlah RSNI-3 sub bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang disusun (judul; non kumulatif)	5	5	5	6	6							
				Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya bidang kesehatan ikan dan lingkungan yang berdaya saing dan berkelanjutan	Jumlah laboratorium penyakit ikan, kualitas air, pakan dan Residu yang memenuhi standar teknis (unit; kumulatif)	60	57	63	71	81							
					Pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (sampel)	25.235	29.025	33.285	36.935	41.135							
					Jumlah hasil perekayasa teknologi terapan bidang sistem keskanling (paket teknologi)	16	18	19	20	21							
					Jumlah paket desiminasi teknologi terapan bidang sistem keskanling (paket)	17	18	23	24	25							
				Terselenggaranya pengendalian budidaya bidang kesehatan ikan dan lingkungan secara efektif	Jumlah kawasan budidaya yang penyakit ikan pentingnya dapat dikendalikan melalui surveillance (kawasan)	3	4	6	8	10							
					Jumlah kawasan budidaya yang mendapat penanganan kualitas lingkungannya (kawasan; kumulatif)	35	100	115	130	145							

KERANGKA PENDANAAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Anggaran (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)
KL	Prog	Keg				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	(Rp Miliar)
					Jumlah Obat Ikan yang terjamin, mutu, keamanan dan khasiatnya (obat);	250	272	284	296	308						
					Jumlah sampel produk perikanan budidaya yang diambil minimal 96% bebas residu (sampel)	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600						
					Terselenggaranya kegiatan ketatausahaan kegiatan pengelolaan sistem keskanling	100	100	100	100	100						
			Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan								150,81	464,80	697,20	1.045,8	1.568,70	3.927,31
				Tersedianya kebijakan pembangunan bidang perbenihan yang implementatif	Jumlah RSNI 3 yang tersedia; (Dokumen, non kumulatif)	8	9	10	11	12						
				Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya bidang perbenihan ikan yang berdaya saing dan berkelanjutan	Jumlah produksi calon induk dan induk unggul di UPT/UPTD (ribu ekor, non kumulatif)	0	1.000	1.200	1.400	1.500						
					Jumlah unit pembenihan yang menggunakan induk unggul (unit; kumulatif)	0	600	700	900	1000						
					Jumlah unit pembenihan ikan air tawar siap sertifikasi; (unit; non kumulatif)	0	140	145	160	175						
					Jumlah unit pembenihan ikan air payau siap sertifikasi; (unit, non kumulatif)	0	10	15	20	25						
					Jumlah unit pembenihan ikan laut siap sertifikasi; (unit, non kumulatif)	0	10	15	20	25						
					Jumlah kawasan kebun bibit rumput laut; (kawasan, kumulatif)	22	300	305	310	315						
					Jumlah unit produksi ikan hias yang siap disertifikasi (unit; non kumulatif)	0	5	10	15	20						
					Jumlah hasil perekayasa teknologi terapan bidang sistem perbenihan (paket teknologi)	27	27	30	33	35						
					Jumlah diseminasi teknologi terapan bidang sistem perbenihan (paket)	34	31	34	37	40						
				Terselenggaranya pengendalian budidaya bidang perbenihan secara efektif	Jumlah unit pembenihan bersertifikat CPIB ; (unit, non kumulatif)	420	540	670	820	990						
				Terselenggaranya kegiatan ketatausahaan kegiatan pengelolaan sistem perbenihan	Prosentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Dit.Perbenihan (persen)	100	100	100	100	100						
			Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya								451,71	315,50	473,3	709,9	1064,8	3.015,14
				Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perikanan budidaya yang implementatif	Jumlah perencanaan penataan kawasan perikanan budidaya (kab/kota) non kumulatif	0	20	25	30	35						
					Jumlah perencanaan detail dan /atau pembangunan kawasan perikanan budidaya (kawasan)	0	34	40	46	52						
					Jumlah RSNI 3 sarana dan prasarana Perikanan Budidaya yang disusun (judul) non kumulatif	8	9	10	11	12						

KERANGKA PENDANAAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Anggaran (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)
KL	Prog	Keg				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	(Rp Miliar)
				pemanfaatan sumberdaya bidang produksi perikanan budidaya yang mandiri dan berkelanjutan	Jumlah analisis dan publikasi data statistik perikanan budidaya (laporan)	6	6	6	6	6						
					Jumlah hasil perekayasa teknik pembudidayaan ikan sub bidang pengelolaan produksi dan usaha budidaya (paket teknologi)	14	14	14	18	18						
					Jumlah lokasi percontohan/diseminasi teknologi (lokasi, non kumulatif)	24	124	144	164	184						
				Terselenggaranya sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik pada unit pembudidaya ikan	Unit Pembudidayaan ikan bersertifikat CBIB skala kecil dan skala besar(unit; kumulatif)	9.200	10.980	13.780	16.760	20.200						
				Meningkatnya jumlah skala usaha kelompok pembudidaya ikan yang menerapkan teknologi anjuran	Jumlah kelompok masyarakat yang ditumbuhkembangkan usahanya di bidang perikanan budidaya (paket)	0	700	900	1.100	1.300						
				Terselenggaranya kemandirian usaha perikanan budidaya yang berkelanjutan	Jumlah pembudidaya yang memperoleh akses permodalan melalui fasilitasi (orang; non kumulatif)	0	500	600	700	800						
					Jumlah unit usaha budidaya yang mendapat layanan perizinan (unit; kumulatif)	650	700	750	800	850						
					Jumlah UPP yang ditingkatkan kapasitas usahanya (unit, non kumulatif)	0	20	30	40	50						
				Terselenggaranya kegiatan ketatausahaan kegiatan pengelolaan produksi dan usaha	Prosentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Dit.Produksi dan Usaha (persen)	100	100	100	100	100						
			Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya								285,91	400,13	432,79	469,61	511,20	2.099,64
				Tersedianya ASN DJPB yang kompeten dan profesional	Indeks kompetensi dan integritas	65	75	77	80	85						
				Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	40%	50%	60%	70%	100%						
				Terwujudnya birokrasi DJPB yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Penerapan RB DJPB	BB	A	A	A	AA						
				Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien	Nilai efisiensi anggaran DJPB	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%						
				Terpenuhinya belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai DJPB (%)	100	100	100	100	100						
					Persentase pemenuhan layanan perkantoran DJPB (%)	100	100	100	100	100						
			PROGRAM PENGUATAN DAYA SAING DAN LOGISTIK HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN								1.008,87	1.821,15	2.500,00	3.000,00	3.500,00	11.830,02
				Meningkatnya daya saing produk kelautan dan perikanan di dalam dan luar negeri	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (US\$ Miliar)		6,82	7,62	8,53	9,54						
					Nilai produk kelautan dan perikanan (Rp. Triliun)		275	327	391	470						
					Utilitas UPI (%)		45,00	47,00	49,00	51,00						
					Rata-rata Konsumsi Ikan per Kapita Nasional (Kg/Kap)		43,88	47,12	50,65	54,49						
					Nilai Investasi Hasil Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)		3,52	3,87	4,26	4,69						

KERANGKA PENDANAAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Anggaran (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)
KL	Prog	Keg				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	(Rp Miliar)
					Peningkatan kualitas garam KI (%)		15	20	25	30						
				Meningkatnya logistik hasil kelautan dan perikanan	Volume Produk Olahan Hasil Perikanan		6	6	6	6,3						
					Disparitas harga di tingkat produsen dan konsumen (%)		100,00	90,00	80,00	70,00						
					Produksi garam rakyat (Juta ton)		3,30	3,60	3,80	4,10						
				Meningkatnya kesejahteraan pengolah dan pemasar hasil perikanan	Nilai Tukar Pengolah		102	103	104	105						
				Peningkatan Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan							199,07	375,75	515,82	618,98	722,14	2.431,75
				Meningkatnya Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan	Jumlah fasilitasi promosi dan kerjasama peningkatan ekspor hasil kelautan dan perikanan di luar negeri (paket)		7	7	7	8	-	374,75	513,82	615,48	717,14	2.221,18
					Jumlah fasilitasi promosi dan kerjasama peningkatan konsumsi hasil kelautan dan perikanan di dalam negeri (paket)		35	35	35	35						
					Perundingan dan pengaman pasar internasional (paket)		5	7	7	8						
					Jumlah Peningkatan kapasitas dan Pembinaan pemanfaatan Pasar (lokasi)		504	405	306	257						
					Jumlah lokasi pengembangan penyiasatan pasar (<i>market intelligence</i>) hasil kelautan dan perikanan di dalam negeri (lokasi)		5	34	34	34						
					Jumlah lokasi pengembangan penyiasatan pasar (<i>market intelligence</i>) hasil kelautan dan perikanan di luar negeri		2	5	8	10						
					Jumlah Festival Perikanan Nusantara dan Lomba Aneka Masakan (paket)		35	35	35	35						
					Jumlah inovasi menu masakan berbahan baku ikan (paket)		35	35	35	35						
					Jumlah lokasi penataan sentra kuliner hasil perikanan (lokasi)		1	5	5	5						
				Terfasilitasinya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Akses Pasar dan Promosi	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Akses Pasar dan Promosi (dokumen)		1	1	1	1	-	1,00	2,00	3,50	5,00	11,50
				Peningkatan Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan							35,57	313,60	430,49	516,59	602,69	1.863,36
				Meningkatnya mutu dan diversifikasi produk kelautan	Jumlah Diversifikasi Ragam Produk Non Bioteknologi di Lokasi yang dibina		3	5	7	9		312,60	428,49	513,09	597,69	1.851,86
					Nilai Produk Non Bioteknologi Kelautan (Rp. Triliun)		13	16	20	24,61						
					Jumlah UMKM Produk Kelautan yang dibina dan dikembangkan (UMKM)		75	90	105	120						
					Jumlah Usaha Besar Produk Kelautan yang dibina dan dikembangkan (Usaha Besar)		3	4	5	6						
					Jumlah lokasi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Produk Kelautan (Lokasi)		50	55	60	65						

KERANGKA PENDANAAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Anggaran (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)
KL	Prog	Keg				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	(Rp Miliar)
					Jumlah lokasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Produk Kelautan (Lokasi)		40	50	55	60						
					Jumlah Rancangan standar nasional indonesia yang disusun dalam Penguatan Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan, (RSNI)		5	5	5	5						
					Jumlah Standar Nasional Indonesia yang diterapkan dalam Penguatan Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan,(SNI)		5	10	15	20						
					Jumlah Diversifikasi Ragam Produk Bioteknologi di Lokasi yang dibina		2,00	4,00	6,00	8						
					Nilai Produk Bioteknologi Kelautan (Rp. Triliun)		0,22	0,46	0,61	0,88						
				Terfasilitasinya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan (dokumen)		1	1	1	1		1,00	2,00	3,50	5,00	11,50
			Peningkatan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan								356,53	543,00	745,41	894,48	1.043,57	3.582,99
				Meningkatnya mutu dan diversifikasi produk perikanan	Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan dan keamanan pangan hasil perikanan (UPI)		333,33	406,67	520,00	625,00	-	538,00	737,91	884,48	1.031,07	3.191,47
					Jumlah rancangan standar nasional indonesia (RSNI) yang disusun (RSNI)		5,00	8,67	14,00	20,00		2,00	2,44	3,12	3,75	
					Jumlah standar nasional indonesia (SNI) produk perikanan yang dievaluasi penerapannya (SNI)		6,67	10,67	15,33	20,67		1,00	1,75	2,83	4,04	
					Jumlah sertifikat kelayakan pengolahan yang diterbitkan bagi unit pengolahan ikan (SKP)		323,33	406,67	490,00	583,33		1,00	1,26	1,52	1,80	
					Jumlah Kerjasama Pelaku Usaha yang Terbentuk (kerjasama)		3,33	5,00	6,67	8,33		1,50	2,25	3,00	3,75	
					Jumlah Lokasi monitoring ketersediaan bahan baku dalam rangka memenuhi kebutuhan UPI (lokasi)		6,67	8,33	10,00	11,33		1,50	1,88	2,25	2,55	
					Kenaikan rata-rata proporsi nilai tambah terhadap total produk olahan perikanan pada 3 komoditas utama (% , volume/volume)		35,00	37,00	39,00	41,00		1,00	1,50	2,00	2,50	
					Jumlah Ragam produk olahan bernilai tambah di lokasi yang dibina (Ragam)		25,00	30,00	35,00	40,00		2,00	2,40	2,80	3,20	
					Jumlah lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang dianalisa dalam rangka memenuhi standar mutu dan diversifikasi produk perikanan (Lokasi)		35,00	45,00	55,00	65,00		525,00	720,04	861,87	1.001,98	
					Jumlah lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang dimanfaatkan dalam rangka memenuhi standar mutu dan diversifikasi produk perikanan (Lokasi)		25,00	35,00	35,00	55,00		2,00	2,80	2,80	4,40	
				Meningkatnya mutu produk olahan hasil perikanan di sentra perikanan terpadu	Lokasi pengembangan mutu pengolahan hasil perikanan di sentra perikanan terpadu (lokasi)		4	6	8	10		4,00	6,00	8,00	10,00	28,00
				Terfasilitasinya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan	Dukungan Manajemen Direktorat Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan (Dokumen)		1	1	1	1		1	2	2	3	7,00

KERANGKA PENDANAAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Anggaran (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)
KL	Prog	Keg				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	(Rp Miliar)
					Jumlah penyiapan bahan RSNI pengolahan dan pemasaran (bahan RSNI)		5	5	5	5						
					Jumlah produk bersertifikat SNI (Produk)		9	11	13	15						
					Jumlah data uji nutrisi dan mutu produk perikanan (Data)		600	600	600	600						
					Jumlah UMKM yang terfasilitasi inkubasi bisnis/pengembangan usaha (UMKM)		6	9	9	9						
				Terfasilitasinya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BBP2HP	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BBP2HP (dokumen)		1	1	1	1		3,00	4,50	5,00	7,50	20,00
			Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing dan Logistik Produk Kelautan dan Perikanan								155,95	148,78	204,24	245,10	285,95	1.040,01
				Terwujudnya ASN DJ PDSPKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian	Indeks kompetensi dan integritas	65	75	77	80	85		56,58	77,67	93,21	108,75	
				Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	40%	50%	60%	70%	100%		19,81	27,19	32,63	38,07	
				Terwujudnya birokrasi DJ PDSPKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi DJ PDSPKP	BB	BB	A	A	AA		16,98	23,31	27,97	32,63	
				Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien & akuntabel	Nilai kinerja anggaran lingkup DJ PDSPKP (%)	Baik (80-90)	Baik (80-90)	Baik (80-90)	Sangat baik (>90)	Sangat baik (>90)		55,41	76,07	91,28	106,50	
					Opini atas laporan keuangan Ditjen PDSPKP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
			PROGRAM PENGELOLAAN RUANG LAUT								1.382,36	2.401,41	2.644,25	3.262,37	3.872,26	13.562,65
				Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat KP	Jumlah masyarakat adat, tradisional dan lokal di PPK yang direvitalisasi		5	8	10	15						
					Jumlah kawasan wisata bahari yang dikembangkan (kawasan)		3	6	9	12						
				Terwujudnya Kedaulatan dalam pengelolaan SDKP	Jumlah Pulau-pulau kecil yang Mandiri (pulau)		10	15	20	25						
				Terwujudnya Pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan	Jumlah kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat efektifitas pengelolaannya (kawasan)		28	30	33	35						
					Jumlah kawasan pesisir rusak yang pulih kembali (Kawasan)		55	60	75	85						
					Jumlah luas kawasan konservasi (jt Ha)		17,1	17,9	18,8	20						
					Jumlah keanekaragaman hayati laut yang dilindungi dan dilestarikan (jenis)		15	19	19	20						
					Jumlah Jasa Kelautan yang dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)		4	6	8	10						

KERANGKA PENDANAAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Anggaran (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)
KL	Prog	Keg				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
					Perairan laut NKRI yang memiliki Dokumen RTRLN		1	-	-	-						
				Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan	Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi dan/atau masterplan dan bisnisplan yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan (kawasan)		38	42	47	53						
			Perencanaan Ruang Laut								-	98,29	106,42	112,66	121,58	
				Tersusunnya dokumen Rencana Tata Ruang Laut Nasional	Perairan laut NKRI yang memiliki Dokumen RTRLN		1	-	-	-		2,00	2,20	2,42	2,66	
				Tersusunnya rencana zonasi di wilayah laut, selat, dan teluk antar wilayah	Jumlah wilayah laut antar wilayah, KSN dan KSNT yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan		38	40	42	43		56,00	61,60	67,76	74,54	
				Tersusunnya dokumen masterplan Kawasan Strategis Nasional / Tertentu	Jumlah KSN dan KSNT yang memiliki masterplan dan bisnisplannya ditetapkan melalui peraturan perundangan							25,00	24,00	23,00	21,00	
				Terevaluasinya substansi dan akselerasi legalitas dokumen RZWP3K	Jumlah Provinsi yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan		10	15	15	20		12,00	15,00	15,50	19,00	
				Terselenggaranya penatausahaan Direktorat PRL yang tepat waktu	Tersedianya data dan sistem informasi perencanaan ruang laut		15	20	25	30						
				Terselenggaranya penatausahaan Direktorat PRL yang tepat waktu	Persentase penatausahaan Direktorat PRL yang tepat waktu (%)		100	100	100	100		3,29	3,62	3,98	4,38	
			Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut								-	252,02	277,22	304,95	335,44	
				Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	Penambahan luas kawasan konservasi (ribu Ha)		600.000	800.000	900.000	1.200.000		212,61	233,87	257,25	282,98	
					Jumlah Kawasan Konservasi Perairan yang meningkat kualitas lingkungannya melalui upaya pengelolaan efektif		28	30	33	35						
					Kawasan Konservasi perairan yang difasilitasi upaya pemanfaatannya untuk peningkatan pendapatan masyarakat (kawasan)		20	25	30	35						
				Terwujudnya pengelolaan jenis ikan terancam punah yang dilindungi, dilestarikan dan/ atau dimanfaatkan	Jumlah keanekaragaman hayati laut yang dilindungi dan dilestarikan (jenis)		15	19	19	20		34,00	37,40	41,14	45,25	
				Terwujudnya jejaring/kemitraan kawasan konservasi yang mendukung pengelolaan efektif	Jumlah kemitraan kawasan konservasi yang mendukung pengelolaan efektif (kelompok/masyarakat)		5	10	15	20		2,13	2,34	2,57	2,83	
				Terselenggaranya penatausahaan Direktorat KKKH yang tepat waktu	Persentase penatausahaan Direktorat KKKH yang tepat waktu (%)		100	100	100	100		3,29	3,62	3,98	4,38	
			Pendayagunaan Pesisir									568,28	202,00	230,30	239,33	
				Terwujudnya kawasan pesisir yang direstorasi	Jumlah kawasan pesisir yang direstorasi (kawasan)		5	10	20	30		5,00	10,00	20,00	30,00	
				Terwujudnya sarana dan prasarana di kawasan pesisir	Jumlah kawasan pesisir yang terfasilitasi kegiatan reklamasi dan pengembangan sarana dan prasarananya (kawasan)		8	12	14	16		22,65	24,92	27,41	30,15	

KERANGKA PENDANAAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Anggaran (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)
KL	Prog	Keg				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
					Jumlah kawasan pesisir yang terfasilitasi pengelolannya secara terpadu (kawasan)		4	4	4	4						
				Terwujudnya ketangguhan kawasan pesisir	Jumlah Kawasan pesisir yang meningkatkan ketangguhannya (kawasan)		25	25	25	25		131,34	144,47	158,92	174,81	
				Rehabilitasi kawasan pesisir di pantura jawa	Jumlah kawasan di Pesisir/Pantura Jawa yang direhabilitasi: :							406,00	19,00	20,00	-	
					- Bakau (Batang)		4.000.000	3.000.000	3.000.000	-						
					- Sabuk Pantai (km)		15,00		-	-						
					- ReKayasa Hybrid (km)		50	-	-	-						
				Terselenggaranya penatausahaan Direktorat Pendayagunaan Pesisir yang tepat waktu	Persentase penatausahaan Direktorat PP yang tepat waktu (%)		100	100	100	100		3,29	3,62	3,98	4,38	
			Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil									997,49	1.524,74	2.027,21	2.529,93	
				Bertambahnya ekonomi di Pulau-Pulau Kecil Terluar	Jumlah Pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarannya (pulau)		25	31	31	31		975,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	
				Terwujudnya penataan Pulau-Pulau Kecil /Terluar	Jumlah pulau-pulau kecil termasuk PPKT yang tertata lingkungannya dan tahan terhadap bencana dan perubahan iklim serta (pulau)		20	35	55	61		2,20	2,42	2,66	2,93	
				Terwujudnya investasi di Pulau-Pulau Kecil	Jumlah gugus pulau kecil yang diinvestasikan dalam menunjang pengembangan ekonominya (pulau)		10	15	20	25		14,50	15,95	17,55	19,30	
					Jumlah Pulau Kecil Yang Divalidasi Pembakuan Namanya (Pulau)		500	250	150	150						
				Revitalisasi masyarakat adat / lokal (komunitas)	Jumlah komunitas masyarakat adat, tradisional dan lokal di PPK yang direvitalisasi (komunitas)		5	8	10	15		2,50	2,75	3,03	3,33	
				Terselenggaranya penatausahaan Direktorat PPK yang tepat waktu	Persentase penatausahaan Direktorat PPK yang tepat waktu (%)		100	100	100	100		3,29	3,62	3,98	4,38	
			Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan									222,09	244,30	268,73	295,60	
				Terwujudnya pemanfaatan Air Laut Non Energi dan BMKT	Jumlah Kawasan yang dikelola untuk pemanfaatan Air Laut Non Energi dan BMKT		13	19	25	31		4,70	5,17	5,69	6,26	
				Tertatanya bangunan laut untuk pengembangan ekonomi	Jumlah Kawasan Pemanfaatan Umum yang dikelola untuk Bangunan Laut (kawasan)		3	3	3	3		200,00	220,00	242,00	266,20	
				Tertatanya pipa/kabel bawah laut untuk pengembangan ekonomi	Jumlah Kawasan alur Laut yang ditata untuk pemasangan Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut (kawasan)		3	5	7	9		4,70	5,17	5,69	6,26	
				Terwujudnya pengelolaan kawasan wisata bahari	Jumlah Kawasan yang dibangun sarana prasarana untuk Wisata Bahari		3	6	9	12		9,40	10,34	11,37	12,51	
				Terselenggaranya penatausahaan Direktorat JK yang tepat waktu	Persentase penatausahaan Direktorat JK yang tepat waktu (%)		100	100	100	100		3,29	3,62	3,98	4,38	
			Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PRL									263,24	289,564	318,520	350,372	
				Terwujudnya ASN DJPRL yang kompeten, profesional dan berkepribadian	Indeks kompetensi dan integritas lingkup DJ PRL		65	75	77	80		5,80	6,38	7,02	7,72	

KERANGKA PENDANAAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Anggaran (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)
KL	Prog	Keg				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	(Rp Miliar)
				Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	40%	50%	60%	70%	100%		3,50	3,85	4,24	4,66	
				Terwujudnya birokrasi DJPRL yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi DJPRL	BB	BB	A	A	AA		61,50	67,65	74,42	81,86	
				Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien	Nilai efisiensi anggaran DJPRL		>95%	>95%	>95%	>95%		39,00	42,90	47,19	51,91	
				Terpenuhinya belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai DJPRL (%)		100	100	100	100		143,00	157,30	173,03	190,33	
					Persentase pemenuhan layanan perkantoran DJPRL (%)		100	100	100	100						
			PROGRAM PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								1.529,54	2.022,00	2.225,00	2.370,00	2.530,00	10.676,54
				Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kelompok Masyarakat pengawas yang menerima bantuan	340 kelompok	510 kelompok	680 kelompok	850 kelompok	1020 kelompok						
				Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP	Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	70%	73%	76,00%	81,00%	87,00%						
					Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (11 WPP-NRI)	57%	30%	71%	81%	83%						
				Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif	Persentase penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	82%	85%	87%	90%	92%						
					Persentase kataatan pelaku usaha perikanan di wilayah perbatasan	-	73%	76%	81%	87%						
			Pemantauan SDKP dan Peningkatan Infrastruktur Pengawasan								768,85	876,73	920,00	930,00	940,00	4.435,58
				Terpenuhinya infrastruktur, Sistem Informasi dan Komunikasi pengawasan SDKP terintegrasi dan tepat waktu	Jumlah sistem pengawasan SDKP berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, operasional dan terintegrasi	6 sistem	4 Sistem	5 Sistem	5 Sistem	5 Sistem	760,25	862,93	901,10	906,00	911,80	4.342,08
					a. Regional Monitoring Center(RMC)	3	-	-	-	-						
					b. Surat Keterangan Aktifasi Transmitter (SKAT) on line	3	2	1	1	1						
					c. Sistem Integrasi	-	1	2	2	2						
					e. Automatic Identification System (AIS)	-	1	1	1	1						
					f. Radar Pantai	-	-	1	1	1						
					Jumlah pemenuhan sarana prasarana pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu	104	36	45	38	67						
					a. Kapal Pengawas	-										
					- Tipe A, panjang > 50 meter	4	2	-	1	-						
					- Tipe B, panjang > 40 s.d 50 meter	2	1	2	4	3						
					- Tipe C, panjang > 30 s.d 40 meter	2	0	4	1	6						
					- Tipe D, panjang > 20 s.d 30 meter		-	-	-	-						
					- Tipe E, panjang > 16 s.d 20 meter		-	-	-	-						
					b. Speedboat Pengawas											
					- Speedboat 6 s.d 16 meter	20	0	10	10	10						
					- Rigid Inflatable Boat	10	-	-	-	-						

KERANGKA PENDANAAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Anggaran (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)
KL	Prog	Keg				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	(Rp Miliar)
					- Rubber Boat	20	-	-	-	-						
					c. Kantor Pengawas	4	10	2	3	11						
					d. Dermaga kapal pengawas	1	0	2	2	2						
					e. Bangunan Operator	16	10	6	4	17						
					f. Gudang Barang Bukti	2	10	2	1	1						
					g. Gudang Logistik Kapal Pengawas	0	0	2	2	2						
					h. Rumah Penampungan ABK Non Yustisia	0	0	0	1	1						
					i. Pos Pengawasan	17	0	11	8	13						
					j. Pesawat Patroli Pengawasan (Patrol Planes)	-	3	3	0	0						
					k. Shelter (Komplek Hunian) ABK Kapal Pengawas	0	0	1	1	1						
					l. PUSDAL	6	-	-	-	-						
				Terselenggaranya Pemantauan pengelolaan sumber daya kelautan yang efektif	Jumlah kawasan konservasi dan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat						2,00	5,00	7,00	10,00	12,00	36,00
					- Kawasan Konservasi	12	18	24	30	36						
					- Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	-	6	12	18	24						
				Meningkatnya ketaatan kapal perikanan terhadap ketentuan sistem pemantauan kapal perikanan	Persentase kapal perikanan yang taat terhadap ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	80%	80%	85%	90%	95%	3,00	5,00	8,00	10,00	12,00	38,00
				Terselenggaranya pengelolaan administrasi dan penatausahaan Direktorat	Persentase penatausahaan Dit. Pemantauan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Peningkatan Infrastruktur Pengawasan yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	3,60	3,80	3,90	4,00	4,20	19,50
				Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan							22,99	17,89	55,00	60,00	70,00	225,88
				Terselenggaranya pengawasan kawasan konservasi dan ekosistem perairan yang profesional dan partisipatif	Persentase ketaatan pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati laut terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	1	1	1	1	1	5,30	3,39	16,00	17,00	20,00	61,69
					Jumlah jenis ikan yang dilindungi yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	6 jenis	8 jenis	10 jenis	14 jenis	16 jenis						
				Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha pemanfaatan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang profesional dan partisipatif	Persentase ketaatan pelaku usaha pemanfaatan pesisir terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	0,3	35%	45%	55%	65%	2,10	1,50	14,00	16,00	18,00	51,60
					Persentase ketaatan pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	0,35	40%	55%	65%	75%						
				Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha jasa kelautan dan sumber daya non hayati lainnya yang profesional dan partisipatif	Persentase ketaatan pelaku pemanfaatan jasa kelautan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	45%	55%	60%	75%	80%	7,49	6,00	15,00	16,00	18,00	62,49
				Tersedianya Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil [POLSUS PWP3K] baru yang kompeten	Jumlah Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil baru yang kompeten (orang)	100	50	50	50	50	2,00	2,00	4,00	4,00	5,00	17,00
				Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan secara bertanggung jawab	Jumlah wilayah yang diadakan sosialisasi peraturan dan meningkatkan ketaatan dalam pemanfaatan SDKP (provinsi)	34	34	34	34	34	4,10	3,00	3,50	4,00	5,00	19,60
				Terselenggaranya pengelolaan administrasi dan penatausahaan Direktorat	Persentase penatausahaan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	2,00	2,00	2,50	3,00	4,00	13,50
				Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan							42,19	28,47	85,00	90,00	100,00	345,66

KERANGKA PENDANAAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Anggaran (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)
KL	Prog	Keg				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	(Rp Miliar)
				Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang profesional dan partisipatif	Persentase ketaatan unit usaha penangkapan ikan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	92,95%	93,37%	95.19%	97.07%	99.01%	37,99	20,07	75,10	78,50	88,00	299,66
					Persentase ketaatan unit usaha pengolahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	87,04%	88,29%	89,54%	90,79%	92,04%						
					Persentase ketaatan unit usaha budidaya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	77,00%	82,23%	84,75%	88,96%	92,04%						
					Persentase ketaatan importasi ikan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	90,00%	92,00%	94,00%	96,00%	98,00%						
					Persentase ketertelusuran (traceability) hasil tangkapan kapal perikanan berdasarkan verifikasi pendaratan ikan dalam rangka Serfikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)	80%	82%	84%	86%	88%						
					Persentase ketaatan kemitraan kapal perikanan dengan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	31%	45%	67%	80%	100%						
					Persentase ketaatan implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) sesuai ketentuan	20,0%	40%	60%	80%	90%						
					Persentase ketaatan kapal pengangkut ikan hidup yang masuk di pelabuhan check point terakhir sesuai dengan izin	25%	60%	70%	80%	90%						
				Kelompok Masyarakat Pengawas yang berperan aktif dalam membantu pengawasan SDKP	Jumlah Kelompok Masyarakat pengawas yang aktif dalam pengawasan SDKP	1128 kelompok	1639 kelompok	1685 kelompok	1732 kelompok	1780 kelompok	3,00	5,40	5,90	6,50	6,70	27,50
				Terselenggaranya pengelolaan administrasi dan penatausahaan Direktorat	Persentase penatausahaan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang tepat waktu	1	100%	100%	100%	100%	1,20	3,00	4,00	5,00	5,30	18,50
				Pengoperasian Kapal Pengawas							497,20	328,78	899,00	1000,00	1100,00	3.824,98
				Terselenggaranya Pengawasan WPP-NRI dari kegiatan <i>IUU Fishing</i> dan kegiatan yang merusak SDKP yang profesional dan partisipatif	Jumlah hari operasi kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan <i>IUU fishing</i> dan merusak SDKP di WPP - NRI	280 hari	138 hari	150 hari	150 hari	150 hari	495,70	326,28	895,50	996,50	1096,50	36,06
					Jumlah hari operasi pesawat patroli dalam rangka pengawasan kegiatan <i>IUU fishing</i> dan merusak SDKP di WPP - NRI	44 Hari	-	250 hari	250 hari	250 hari						
					Jumlah wilayah laut perbatasan yang diawasi untuk mencegah nelayan pelintas batas	3 wilayah	4 wilayah	5 wilayah	6 wilayah	7 wilayah						
					Jumlah Awak Kapal Pengawas yang mumpuni dan memenuhi kualifikasi	108 orang	124 orang	124 orang	124 orang	124 orang						
					Jumlah kapal pengawas yang siap operasi	27 Unit	26 unit	26 unit	26 unit	26 unit						
				Terselenggaranya pengelolaan administrasi dan penatausahaan Direktorat	Persentase penatausahaan Direktorat Kapal Pengawas yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	1,50	2,50	3,50	3,50	3,50	
				Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan							27,77	35,82	56,00	60,00	70,00	249,59
				Penanganan dan penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan terpadu	Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	82%	82%	88%	89%	90%	13,50	15,62	22,00	22,50	25,50	99,12

KERANGKA PENDANAAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Anggaran (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)
KL	Prog	Keg				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
					Persentase penyelesaian Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal yang disidik, dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	82%	82%	88%	89%	90%						
					Persentase Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang selesai disidik (P-21) yang dapat dipantau proses tindak lanjutnya	80%	82%	88%	89%	90%						
				Terlindunginya nelayan RI pelintas batas dan diduga melakukan pelanggaran perikanan di negara lain	Persentase Nelayan Indonesia yang difasilitasi pemulangannya karena terindikasi melakukan lintas batas dan pelanggaran bidang perikanan di negara lain	80%	82%	85%	88%	90%	5,27	7,00	9,90	11,00	13,00	46,17
					Jumlah wilayah perbatasan yang nelayannya difasilitasi dan diberikan pemahaman untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain (Provinsi)	6	7	8	9	10						
				Koordinasi antar aparat penegak hukum dalam rangka penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan	Jumlah Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Perikanan dan Kelautan yang Terbentuk dan Terselenggara	34 provinsi	3,90	5,00	9,00	10,00	13,00	40,90				
					Laporan data dan informasi TPKP nasional yang terintegrasi dengan instansi terkait, akurat dan handal	75%	85%	90%	92%	95%						
				Tersedianya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan baru yang kompeten dan aparat penegak hukum di bidang KP yang meningkat kemampuan teknis di bidang Kelautan dan perikanan	Jumlah PPNS Perikanan yang kompeten	60 org	4,10	6,00	12,00	13,00	15,00	50,10				
					Jumlah aparat penegak hukum di bidang kelautan dan perikanan yang direkrut/ditingkatkan pengetahuan teknis bidang kelautan dan perikanan	50 org	60 org	70 org	80 org	85 org						
				Terselenggaranya pengelolaan administrasi dan penatausahaan Direktorat	Persentase penatausahaan Direktorat Penanganan Pelanggaran yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	1,0	2,2	3,1	3,5	3,5	13,30
				Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP							170,54	734,31	210,0	230,00	250,00	1.594,85
				Terwujudnya ASN DJPSDKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian	Indeks kompetensi dan integritas lingkup DJPSDKP	65	75	77	80	85	6,20	6,85	7,14	7,55	8,32	36,06
				Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	Persentase unit kerja lingkup DJPSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	40%	50%	60%	70%	100%	12,00	9,00	10,00	12,00	14,00	57,00
				Terwujudnya birokrasi DJPSDKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi DJPSDKP	BB	BB	A	A	AA	24,75	557,01	28,16	39,45	49,68	699,05
				Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien	Nilai efisiensi anggaran DJPSDKP		>95%	>95%	>95%	>95%	12,00	9,00	10,00	14,00	18,00	63,00
				Terpenuhinya belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai DJPSDKP(%)	100%	100%	100%	100%	100%	115,59	152,45	154,70	157,00	160,00	739,74
					Persentase pemenuhan layanan perkantoran DJPSDKP(%)	100%	100%	100%	100%	100%						
				PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIK LAINNYA KKP							398,95	624,06	650,00	700,00	750,00	3.123,01
				Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian	Indeks kompetensi dan integritas	65	75	77	80	85						

KERANGKA PENDANAAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

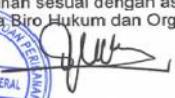
Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Anggaran (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)
KL	Prog	Keg				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
				Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	40%	50%	60%	70%	100%						
				Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Indeks RB KKP	BB	BB	A	A	AA						
				Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel	Nilai kinerja anggaran KKP	Baik (80-90)	Baik (80-90)	Baik (80-90)	Sangat Baik (>90)	Sangat Baik (>90)						
					Opini atas Laporan Keuangan KKP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
		2325	Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Pelaporan KKP									45,55	47,21	50,14	52,04	
				Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai SAKIP KKP	A	A	A	AA	AA						
				Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	40%	50%	60%	70%	100%						
				Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel	Nilai kinerja anggaran KKP	Baik (80-90)	Baik (80-90)	Baik (80-90)	Sangat Baik (>90)	Sangat Baik (>90)						
				Terselenggaranya koordinasi perencanaan, penganggaran, dan monev serta pelaporan pembangunan KP	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan	3	3	3	3	3						
		2326	Pengelolaan Administrasi dan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas KKP									260,45	265,67	285,81	305,85	
				Tersedianya prasarana kantor pusat KKP yang memadai	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor (%)	70	75	80	85	90						
				Terwujudnya pengelolaan rumah tangga kantor pusat KKP yang optimal	Persentase pencapaian standar pelayanan dalam pengelolaan rumah tangga kantor pusat KKP sesuai SOP (%)	82	85	87	90	92						
				Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan, administrasi persuratan dan kearsipan KKP yang optimal	Persentase pencapaian standar pelayanan ketatausahaan pimpinan sesuai SOP (%)	85	87	89	91	93						
					Persentase pencapaian standar pelayanan administrasi persuratan dan kearsipan KKP serta ketatausahaan Biro sesuai SOP (%)	85	87	89	91	93						
				Terwujudnya pengelolaan BMN Setjen yang optimal	Persentase pencapaian standar pelayanan dalam pengelolaan BMN Setjen sesuai SOP (%)	65	70	75	80	85						
				Terselenggaranya layanan pengadaan dan perizinan terpadu	Persentase pemenuhan layanan pengadaan dan perizinan terpadu	100	100	100	100	100						
				Terpenuhinya belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Setjen (%)	100	100	100	100	100						
					Persentase pemenuhan layanan perkantoran Setjen (%)	100	100	100	100	100						
			Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP									11,13	15,00	20,00	25,00	
				Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Indeks RB KKP	BB	BB	A	A	AA						
				Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah	6	6,5	7	7,5	8						
				Terwujudnya naskah kerjasama dan perjanjian internasional dan antar lembaga yang efektif	Persentase penyelesaian naskah kerjasama dan perjanjian internasional dan antar lembaga	82	85	87	90	91						

KERANGKA PENDANAAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Anggaran (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)
KL	Prog	Keg				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	(Rp Miliar)
				Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Lingkup Mitra Inspektorat II yang Berbasis Risiko	Persentase perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra Inspektorat II	100	100	100	100	100						
				Terselenggaranya Pengawasan Internal lingkup Mitra Inspektorat II dan KKP yang Efektif dan Efisien	Nilai Integritas Pelayanan Publik KKP Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup mitra Inspektorat II Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan RB untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat II Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan yang strategis lingkup KKP dan mitra Inspektorat II (per tahun) Cakupan lokasi Pengawasan Pelaksanaan <i>Quick Wins</i> pada Mitra Inspektorat II	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00						
						82,25	82,5	83	83,5	84						
						82,25	82,5	83	83,5	84						
						2	8	9	10	11						
						30	60	65	70	75						
				Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal pada Mitra Inspektorat II yang Efektif	Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup Mitra Inspektorat II Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat II	81	82	83	85	87						
						81	82	83	84	85						
				Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Internal Inspektorat II sesuai Kebutuhan	Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran & pengukuran kinerja Inspektorat II	95	95	95	95	95						
				Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat III dan Pelaksana Pembangunan KP							5,58	9,88	10,28	10,69	11,11	47,54
				Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Lingkup Mitra Inspektorat III yang Berbasis Risiko	Persentase perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra Inspektorat III	100	100	100	100	100						
				Terselenggaranya Pengawasan Internal lingkup Mitra Inspektorat III dan KKP yang Efektif dan Efisien	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KKP Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup mitra Inspektorat III Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan RB untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat III Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan yang strategis lingkup KKP dan mitra Inspektorat III (per tahun) Cakupan lokasi Pengawasan Pelaksanaan <i>Quick Wins</i> pada Mitra Inspektorat III	A	A	A	AA	AA						
						82,25	82,5	83	83,5	84						
						82,25	82,5	83	83,5	84						
						2	8	9	10	11						
						30	60	65	70	75						
				Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal pada Mitra Inspektorat III yang Efektif	Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup Mitra Inspektorat III Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat III	81	82	83	85	87						
						81	82	83	84	85						
				Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Internal Inspektorat III sesuai Kebutuhan	Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran & pengukuran kinerja Inspektorat III	95	95	95	95	95						

KERANGKA PENDANAAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Anggaran (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	
KL	Prog	Keg				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
			Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan								45,00	53,62	56,16	58,27	60,60	273,66	
				Tersedianya ASN KKP yang kompeten dan profesional	Indeks kesenjangan kompetensi pejabat struktural dan fungsional lingkup Itjen	≤15	≤14	≤13	≤12	≤10		5,80	6,38	7,02	7,72		
					Persentase pegawai Itjen yang memenuhi standar diklat (%)	55	60	70	80	90							
				Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses Lingkup Itjen	Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Itjen(%)	40	50	60	70	100							
					Persentase penggunaan informasi pengawasan berbasis IT Lingkup Itjen (%)	55	60	70	80	90							
				Terwujudnya birokrasi Itjen yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Penerapan RB Itjen	BB	BB	A	A	AA							
					Nilai SAKIP Itjen	A	A	A	A	AA							
					Indeks persepsi pegawai KKP terhadap Itjen	4,25	4,35	4,45	4,55	4,60							
					Level Kapabilitas Itjen (IACM)	2	3	3	4	4							
				Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien	Nilai efisiensi anggaran Itjen (%)	>95	>95	>95	>95	>95		39,00	42,90	47,19	51,91		
					Tingkat Kewajaran Pengungkapan LK Itjen	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
				Terpenuhinya belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Itjen (%)	100	100	100	100	100							
					Persentase pemenuhan layanan perkantoran Itjen(%)	100	100	100	100	100							

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

 Hanung Cahyono



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI